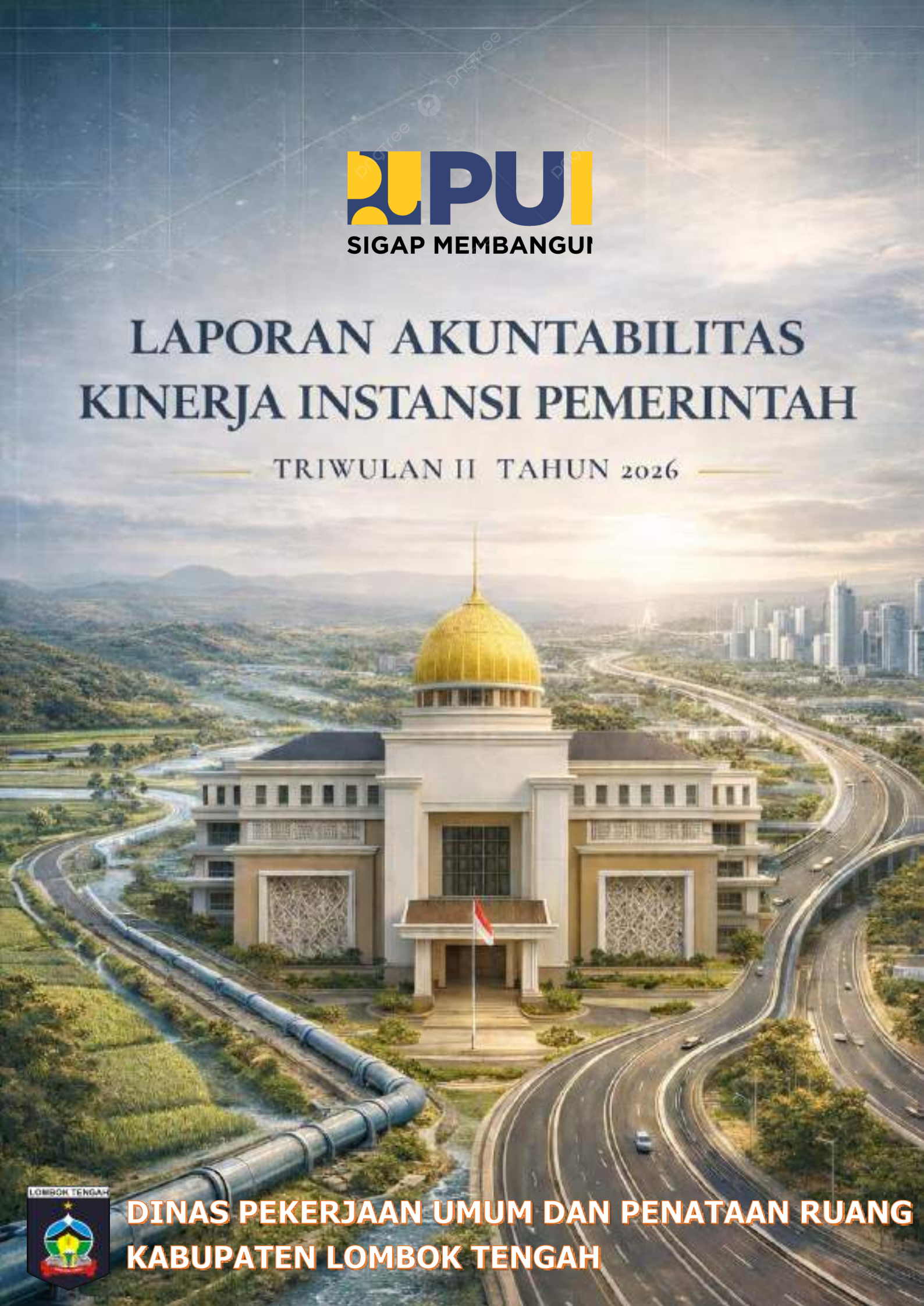
SIGAP MEMBANGUN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TRIWULAN II TAHUN 2026



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahilladzi bi nimatihi tatimmush sholihat, Segala Puji bagi Allah Ta'ala Rabb Semesta Alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Pemimpin para Nabi dan Rasul, Nabi kita Muhamad Shallallahu 'alaihi wasallam.

Amma ba'du.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Triwulan II Tahun 2026 merupakan satu dari komitmen konkret kami dalam menjalankan amanah pertanggungjawaban sebagai pelayan masyarakat perihal capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dalam lingkup Triwulan II (April s.d. Juni 2026) Tahun 2026. Laporan triwulanan ini juga menjadi sarana pemantauan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga langkah perbaikan dapat diambil lebih dini. Sebagaimana arah kebijakan dan sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja, perlu memastikan perencanaan yang searah dengan pelaksanaan, pelaksanaan sesuai target, dan hasilnya terukur secara akuntabel. Dengan data yang lebih lengkap, kami dapat merancang Pembangunan tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah Masyarakat kami.

"...perlu memastikan perencanaan yang searah dengan pelaksanaan, pelaksanaan sesuai target, dan hasilnya terukur secara akuntabel. Dengan data yang lebih lengkap, kami dapat merancang Pembangunan tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah Masyarakat kami."

Dengan mengharapkan pertolongan Allah Ta'ala pula, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan upaya terbaik agar laporan ini selesai tepat waktu dan dapat menyajikan informasi yang memadai atas capaian kinerja dan

realisasi anggaran pada program kerja/kegiatan pada Triwulan II Tahun 2026. Meskipun demikian, kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini memerlukan sejumlah sentuhan perbaikan di masa yang akan datang. Betapa besar harapan kami, Laporan Kinerja ini menjadi informasi yang berimbang dan objektif terhadap capaian pembangunan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, dan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang serta memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good and clean governance*.

Akhir Kata, kami sampaikan apresiasi kepada semua jajaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, khususnya Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyusunan laporan ini.

Praya, 23 Juli 2026
Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

THE MANDALIKA
Arita Lombok

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

I.1.1 Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 75 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.

I.1.2 Kedudukan dan Susunan Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan Bidang Pertanahan. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

I.1.3 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari:

   1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
   3. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:

1. Bidang Sumber Daya Air membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bidang Bina Marga membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Cipta Karya membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Penataan Ruang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Unit Pelaksana Teknis.

I.1.4 Tugas dan Fungsi

I.1.4.1 Kepala Dinas

A. Tugas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

B. Fungsi

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan penetapan kinerja Dinas;
b. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana kegiatan dan program dinas;
c. Pengkoordinasian perumusan, perencanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta rekomendasi perijinan;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
e. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
f. Pengkoordinasian pembangunan gedung Negara;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

I.1.4.2 Sekretariat

A. Tugas

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja lingkup Dinas;
b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas;
c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja lingkup Dinas;
d. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
e. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
f. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
g. Pengkoordinasian Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas;
h. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan perangkat daerah dan/ atau Instansi terkait ;

i. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
j. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

I.1.4.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

A. Tugas

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;
b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, hubungan masyrakat dan perlengkapan;
c. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;
d. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan;
e. Penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksana pelaksanaan tugas Dinas;

f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Dinas;
h. Pelaksanaan tata kelola kearsipan lingkup dinas;
i. Pengkoordinasian penatausahaan Barang Milik Daerah lingkup dinas;
j. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengurus dan atau penyimpan barang;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

I.1.4.4 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

A. Tugas

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan melaksanakan urusan perencanaan, pendataan, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan Lingkup Dinas.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja lingkup Dinas;
b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan dan pelaporan;

c. Penyiapan bahan penyusunan rencana Strategis (renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
d. Pelaksanaan koordinasi peyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain lingkup dinas;
e. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka penyusunan LKj-IP Dinas;
f. Pelaksanaan penyusunan rencana peraturan Perundang-undangan petunjuk pelaksanaan tugas Dinas;
g. Penyiapan bahan Koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Oprasional Prosedur (SOP) Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
h. Penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang penyusunan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas;
i. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka analisis pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi;
j. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
k. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Pemegang Kas (PPK, PPTK);
l. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undang;
m. Pengkoordinasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
n. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
o. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang perencanaan lingkup Dinas;
p. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi perencanaan lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku ;
q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;

r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

I.1.4.5 Bidang Sumber Daya Air

A. Tugas

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Sumber Daya Air.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana (1), Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) serta Program Kerja dan Kegiatan Bidang;
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan teknis sumber daya air;
c. Pengkoordinasian Pembinaan/penyuluhan dan bimbingan teknis dalam pengaturan, pengelolaan, pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya air;
d. Pengkoordinasian pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air;
e. Pengaturan, pengelolaan, pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sumber daya air;
f. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hasil pembangunan, peningkatan, pengembangan, operasional dan pemeliharaan serta pengamanan jaringan pengairan;
g. Penanggulangan tanggap darurat akibat bencana alam;
h. Pengelolaan perijinan dan pengawasan pemanfaatan air dan sumber daya air;
i. Pelaksanaan pengembangan, pengelolaan rawa dan pantai;
j. Pengaturan, pengembangan dan pengelolaan air baku;
k. Pendataan aset di Bidang Sumber Daya Air;

l. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan Bidang Sumber Daya Air;
m. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian laporan Bidang Sumber Daya Air;
n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;
o. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
p. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar pelayanan Minimal (SPM) lingkup bidang;
q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

I.1.4.6 Bidang Bina Marga

A. Tugas

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Bina Marga.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penetapan program kerja dan kegiatan bidang;
b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) bidang;
c. Pembinaan dan bimbingan teknis, pengendalian dan rekomendasi serta perencanaan teknis pembangunan bidang kebinamargaan;

d. Pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis bidang kebinamargaan;
e. Penyelenggaraan pengawasan sarana dan prasarana jalan dan jembatan serta pengembangannya;
f. Penyiapan rumusan penetapan status jalan dan jembatan kabupaten dan desa;
g. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten dan desa;
h. Fasilitasi pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan Provinsi dan Nasional;
i. Pengkoordinasian pendataan dan penginventarisir aset-aset jalan dan jembatan kabupaten dan desa;
j. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan SOP dan SPM lingkup bidang;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

I.1.4.7 Bidang Cipta Karya

A. Tugas

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Cipta Karyalingkup Bidang Cipta Karya.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian perumusan dan penetapan program kerja dan kegiatan bidang;

b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) bidang;
c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pembinaan /bantuan teknis, pengendalian dan rekomendasi perencanaan pembangunan keciptakaryaan;
d. penyusunan bidang Cipta Karya tingkat Kabupaten;
e. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan gedung Negara;
f. Pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis lingkup bidang keciptakaryaan;
g. Pengkoordinasian penyusunan rencana pembinaan bangunan gedung pemerintah;
h. Pengkoordinasian penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Bidang Cipta Karya;
j. Pelaksanaan penyusunan Rencana pengelolaan pengembangan Penyehatan Lingkungan (Air Bersih dan Sanitasi);
k. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Penyehatan Lingkungan (Air Bersih dan Sanitasi);
l. Pembinaan, pemberdayaan, dan pengendalian pembangunan sistem pengelolaan Penyehatan Lingkungan (Air Bersih dan Sanitasi);
m. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal lingkup bidang;
n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

I.1.4.8 Bidang Penataan Ruang

A. Tugas

Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang penataan ruang.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) bidang;
b. Pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang penataan ruang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang;
c. Pelaksanaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
d. Pelaksanaan penyusunan program dan pemanfaatan ruang;
e. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

I.1.4.9 Unit Pelaksana Teknis

A. Tugas

Unit Pelaksana Teknis melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkaitan dengan kegiatan teknis operasional tertentu dan / atau kegiatan penunjang tertentu.

B. Fungsi

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

I.1.4.10 Kelompok Jabatan Fungsional

Pada lingkup Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

I.2 DATA KEPEGAWAIAN

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan akhir Agustus 2025 sebanyak 185 orang dengan beberapa hal yang harus disesuaikan. Secara rinci data PNS di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada Tabel berikut:

Data kepegawaian per Triwulan II 2026 belum tersedia pada laporan ini, sehingga yang disajikan adalah data terakhir yang tersedia (Agustus 2025). Karena itu, analisis efisiensi sumber daya manusia pada Bab III belum dapat menilai kecukupan pegawai, beban kerja, dan produktivitas per bidang.

Tabel 1.1 Register Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
(Keadaan Per Agustus 2025)

No.	NAMA	PANGKAT		JABATAN		PENDIDIKAN	JURUSAN
		Gol	TMT	JABATAN	TMT		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ir. LALU RAHADIAN, M.Si	IV/c	01-10-2017	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	06-09-2021	S2	Ilmu Pengelolaan SDA & Lingkungan
2	MUHAMMAD SARJAN, ST.MT.	IV/b	01-10-2023	Sekretaris Dinas	12-05-2023	S2	Mag. Perenc. Kota & Daerah
3	JALALUDIN, S.T., MT	IV/a	01-04-2022	Penata Ruang Ahli Muda	31-12-2021	S2	Magister Teknik Sipil
4	ZULKIPLI, ST. MT.	IV/a	01-04-2023	Teknik Pengairan Ahli Muda	31-12-2021	S.2	Teknik Pengairan
5	MUNAWARDI, ST.MT	IV/a	01-04-2024	Kabid Sumber Daya Air	07-01-2020	S2	Teknik Sipil
6	AMIR HAMZAH, S.T.	III/d	01-10-2011	Penata Ruang Ahli Muda	31-12-2021	S1	Teknik Mesin
7	NURUL CHAERANI, S.T.	III/d	01-04-2012	Teknik Pengairan Ahli Muda	31-12-2021	S1	Teknik Pengairan
8	SURAJE, ST.	III/d	01-10-2016	Teknik Pengairan Ahli Muda	31-12-2021	S1	Tehnik Sipil
9	LALU AHADI, S.Sos.	III/d	01-04-2017	Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan		S1	Ilmu Adm. Negara
10	MUHAMAD NASRI, ST.	III/d	01-04-2019	Teknik Tata Bangunan Ahli Muda	31-12-2021	S1	Teknik Arsitek
11	LALU MIRZA AMRULLOH, ST.	III/d	01-04-2020	Penguji Laboratorium Tanah Aspal dan Beton	01-02-2024	S1	Teknik Sipil
12	LALU ZUL EKASAPTA RAK PUTRA, ST	III/d	01-04-2021	Kepala UPT. Air Limbah Domestik	03-05-2024	S1	Teknik Sipil
13	EKANITA SOVIANTI, ST.M.Eng	III/d	01-04-2021	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	31-12-2021	S.2	Perencanaan Kota dan Daerah
14	AHMAD HALIFI, SE.	III/d	01-04-2021	Kasubbag. TU. UPT. Air Limbah Domestik	20-03-2024	S1	Ekonomi Pembangunan
15	ARIFUDIN NUR, ST. MSc	III/d	01-04-2022	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	31-12-2021	S2	Magister Sistem & Teknik Transportasi
16	MASSADRI ZULKARNAIN, ST. MT	III/d	01-04-2022	Kabid Bina Marga	07-01-2020	S2	Teknik Sipil
17	IQBAL PRAYADI SAPUTRA, ST. MT	III/d	01-04-2022	Kepala Bidang Cipta Karya	03-05-2024	S2	Pembangunan Wilayah dan Kota
18	EKO HANDI HANDOYO, S.T.	III/d	01-04-2022	Kepala UPT. Peralatan dan Pengujian	07-01-2020	S1	Teknik Mesin

No.	NAMA	PANGKAT		JABATAN		PENDIDIKAN	JURUSAN
		Gol	TMT	JABATAN	TMT		
1	2	3	4	5	6	7	8
19	LALU RUDY HERMAWAN, S.T. M.P.W.K	III/d	01-04-2022	Kepala Bidang Penataan Ruang	03-05-2024	S2	Teknik Pemb. Wil & Kota
20	ZULKARNAIN HAKIM, SE, M.Ak	III/d	01-04-2022	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	03-05-2024	S2	Akuntansi Pemerintahan
21	TODY AULIYA, S.T.	III/d	01-04-2022	Perencana Ahli Pertama	01-02-2024	S1	Teknik Perenc. Wil & Kota
22	R. DWIONO EKO PRASETYO, ST.	III/d	01-04-2023	Analis Sumber Daya Air	07-01-2020	S1	Teknik Sipil
23	BAIQ ERNAWATI, SE.	III/c	01-10-2021	Kasubag TU UPT. Jasa Konstruksi	03-05-2024	S1	Ekonomi Pembangunan
24	BUYUNG SASAKA ARPAN, ST.	III/c	01-10-2021	Pengawas Jalan dan Jembatan		S1	Teknik Sipil
25	PAIMAN, S.Adm	III/c	01-04-2022	Pengolah Sarana dan Prasrana Pengairan Jonggat)		S1	Ilmu Adm. Negara
26	BUDIMAN, ST	III/c	01-04-2024	Pengawas Jalan dan Jembatan		S1	Teknik Sipil
27	MUSTIAJI	III/b	01-04-2012	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		STM	Otomotif
28	BAIQ FITRIAH	III/b	01-04-2015	Bendahara Pengeluaran Pembantu		SMA	Ilmu-ilmu Fisik
29	LALU AZIS FARHAN	III/b	01-04-2018	Pemelihara Jalan		STM	Bangunan
30	LALU ANDI AHMAD SUPRIADI	III/b	01-04-2018	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	30-12-2021	SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
31	KASPUL HADI, S. Adm.	III/b	01-10-2020	Pengelola Pemeliharaan Jalan		S1	Ilmu Adm. Negara
32	SRI SURIANTINI, ST.	III/b	01-10-2020	Penyusun Program Anggaran & Pelaporan		S1	Teknik Mesin
33	LALU RAHMAN	III/b	01-04-2022	Pengadministrasi Umum		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
34	HENDRAWAN SOEKRATES	III/b	01-04-2022	Bendahara Pengeluaran Pembantu	01-01-2024	STM	Bangunan
35	BAIQ RINA RAHMAWATI, SE	III/b	01-04-2022	Bendahara/Bendahara Pengeluaran		S1	Ekonomi Pembangunan
36	ZIBAN BAKHTIAR, A.Md.	III/b	01-04-2021	Pengelola DAta		D. III	Teknik Mesin
37	LALU ARYA SUGITA, ST	III/b	01-04-2021	Pengawas Jalan dan Jembatan		S1	Teknik Sipil

No.	NAMA	PANGKAT		JABATAN		PENDIDIKAN	JURUSAN
		Gol	TMT	JABATAN	TMT		
1	2	3	4	5	6	7	8
38	SATRIAWANGSA , S.AP	III/b	01-04-2021	Sub. Bagian TU UPT Peralatan & Pengujian		S1	Ilmu Adm. Negara
39	KAMIL, SH	III/b	01-04-2023	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan (Wil. Janapria)		S1	Ilmu-Ilmu Sosial
40	BAIQ ERNAWATI, S.Sos	III/b	01-04-2023	Pengadministrasi Umum		S1	IPS
41	MAHENDRA SUGANDHI, ST	III/b	01-04-2023	Pengawas Jaringaan Utilitas		S1	Teknik Sipil
42	MAYA GITA PERTIWI, ST	III/b	01-04-2023	Analis Tata Ruang		S1	Teknik Sipil
43	MUHAMAD REDWAN, S.Adm	III/b	01-10-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		S1	Bahasa
44	FATIMATUZZAHRAH, SE	III/b	01-04-2024	Pengelola Administrasi Keuangan		SMK	Akuntansi
45	BAIQ RUKYATILWATI, SE	III/a	01-04-2021	Pengadministrasi Umum		SMA	Ilmu-ilmu Biologi
46	BURHAN, S.Adm	III/a	01-04-2021	Pengadministrasi Umum		SPP	Pertanian & Pemb.
47	JAPARUDIN	III/a	01-04-2021	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah		SMU	IPS
48	ALDHI TRY SUWANTO, S.P.W.K	III/a	01-03-2022	Penyusun Rencana Tata Ruang	01-03-2002	S1	Perencana Wilayah dan Kota
49	ARIEF MUNANDAR, ST	III/a	01-03-2022	Penyusun Rencana Tata Ruang	01-03-2002	S1	Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
50	CAHYU RIESTYA VINANDA, S.P.W.K	III/a	01-03-2022	Analis Tata Ruang	01-03-2002	S1	Perencana Wilayah dan Kota
51	LALU MOCHAMAD HARISTA WIBAWA, ST	III/a	01-03-2022	Analis Bangunan Gedung dan Permukiman	01-03-2002	S1	Teknik Sipil
52	LALU NATA TRESNA HADI, ST	III/a	01-03-2022	Analis Bangunan Gedung dan Permukiman	01-03-2002	S1	Arsitektur
53	NASRUL HASBY, ST	III/a	01-03-2022	Analis Sumber Daya Air	01-03-2002	S1	Teknik Sipil
54	NURMAN EKA PRANATA, ST	III/a	01-03-2022	Analis Sumber Daya Air	01-03-2002	S1	Teknik Sipil
55	VIVIN NOVITA NINGSIH, ST	III/a	01-03-2022	Pengawas Jalan dan Jembatan	01-03-2002	S1	Teknik Sipil

No.	NAMA	PANGKAT		JABATAN		PENDIDIKAN	JURUSAN
		Gol	TMT	JABATAN	TMT		
1	2	3	4	5	6	7	8
56	LALU ARIF SUSBANDI, S.Adm	III/a	01-04-2022	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jurang Sate Hulu)		S1	Akuntansi
57	BAHARUDIN	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jurang Sate Hulu)		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
58	SUKAMTO	III/a	01-04-2023	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan (Batukliang & Batukliang Utara)		SMEA	Perdagangan
59	AWALUDDIN	III/a	01-04-2023	Pemelihara Peralatan		SMA	IPS
60	MANSYUR, S.Adm	III/a	01-04-2023	sekertaris/Ajudan		S1	Ilmu Adm. Negara
61	SAHNAN	III/a	01-04-2023	Pengelola Data		STM	Bangunan
62	LALU MUHAMAD ALI	III/a	01-04-2023	Pemelihara Jalan		STM	Bangunan
63	NASIP	III/a	01-04-2023	Petuga Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jonggat)		STM	Bangunan
64	KISWARA	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jonggat)		STM	Bangunan
65	LALU RAIS ASHARI	III/a	01-04-2023	Pengadministrasi Umum		SMA	IPS
66	SAPRUN	III/a	01-04-2023	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan (Praya & Jonggat)		STM	Bangunan
67	LALU SYAMSUL ANWAR	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA A.3	IPS
68	HIRMAYADI	III/a	01-04-2023	Pengadministrasi Kepegawaian		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
69	AMRILLAH, ST	III/a	01-04-2023	Pemelihara Jalan		S1	Teknik Sipil
70	SARII	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Ai(DI Jonggat)		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
71	LALU HIRJAN, ST	III/a	01-04-2023	Pengadministrasi umum		STM	Bangunan

No.	NAMA	PANGKAT Gol	PANGKAT TMT	JABATAN JABATAN	JABATAN TMT	PENDIDIKAN	JURUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
72	MUHAMAD MULIAMIN	III/a	01-04-2023	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Wilayah Praya Tengah)		SMEA	Perkantoran
73	ARJAWI	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (DI Mujur II)		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
74	SRI HARTINI	III/a	01-04-2023	Pengadministrasi Umum		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
75	SRI ARTATI	III/a	01-04-2023	Bendahara Pengeluaran Pembantu		SMA A.3	IPS
76	M. HUSNI AMRI	III/a	01-04-2023	Penjaga Pintu Air		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
77	EVI FEBRIANTY	III/a	01-04-2023	Bendahara Pengeluaran Pembantu		SMA	Ilmu-ilmu Biologi
78	LALU AGUS PUTRA	III/a	01-04-2023	Pengadministrasi Kepegawaian		SMU	IPS
79	JASWADI	III/a	01-04-2023	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan (Wilayah Praya Timur)		SMA	IPS
80	SUARMAN	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI Janapria)		SMA	IPA
81	EROWAN	III/a	01-04-2023	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan		SMA	IPA
82	JASMUNI	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI Janapria)		SMA	IPA
83	SYAHRUDDIN	III/a	01-04-2023	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Wilayah Praya Barat Daya)		SMA	IPS
84	ALI SADIKIN	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI Janapria)		STM	Bangunan

No.	NAMA	PANGKAT		JABATAN		PENDIDIKAN	JURUSAN
		Gol	TMT	JABATAN	TMT		
1	2	3	4	5	6	7	8
85	RAHMAT	III/a	01-04-2023	Pengelola Sampel pengujian		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
86	LALU RIZAL AHMADI	III/a	01-04-2023	Pengadministrasi Umum (UPT. Jasa Konstruksi)		SMA	Ilmu-ilmu Fisik
87	SUHERMAN	III/a	01-04-2023	Pengemudi		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
88	SUPARDI	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI Janapria)		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
89	SLAMET SUPARDI	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI Janapria)		SMA A.3	IPS
90	SUJATMI	III/a	01-04-2023	Pengadministrasi Keuangan		SMA A.2	Biologi
91	LALU SAIFUL BAHRI	III/a	01-04-2023	Pengadministrasi Umum		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
92	MANGKU BUANA SARDI, S.Adm	III/a	01-04-2023	Penjaga Pintu Air (BPY 2 Bunkate)		S1	Ilmu Adm. Negara
93	BADARUDIN, ST	III/a	01-10-2023	Pengelola Data		S1	Teknik Sipil
94	DITYA EDWIN EKAYANA, S.Sos	III/a	01-10-2023	Pemelihara Jalan		S1	Ilmu Ilmu Sosial
95	SABRI	III/a	01-10-2023	Pengadministrasi Keuangan		SMA	Paket C
96	MAAD ADNAN	III/a	01-04-2024	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Renggung Hulu		MA	Ilmu-Ilmu Agama
97	MUHAMAD JABIR	III/a	01-04-2024	pengadministraasi umum		SMA A.4	Bahasa
98	RAHMAN ABDANI	III/a	01-04-2024	Pengelola Sampel Pengujian		STM	Bangunan
99	MOHAMAD ERWAN	III/a	01-04-2024	Penjaga Pintu Air		SMA A.3	IPS
100	AWALUDIN	III/a	01-04-2024	Pengelola Data		STM	Bangunan
101	SAMSURIYANI	III/a	01-04-2024	Pengadministrasi Umum		SMU	IPS
102	LALU PITRAJAYA	III/a	01-04-2024	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA A.4	Bahasa

No.	NAMA	PANGKAT		JABATAN		PENDIDIKAN	JURUSAN
		Gol	TMT	JABATAN	TMT		
1	2	3	4	5	6	7	8
103	LALU ASMAYADI	III/a	01-04-2024	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA A.3	IPS
104	LALU MISBAN	III/a	01-04-2024	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		MA	IPS
105	LALU RONI SATRIA	III/a	01-04-2024	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jurang Sate Hulu)		SMA A.4	Bahasa
106	JAZARI AHMAD	III/a	01-04-2024	Operator Alat Berat		SMA A.3	IPS
107	DWI ARIYANTI IWANA	III/a	01-04-2024	Pengadministrasi Umum		STM	Bangunan
108	LINDA SARI	III/a	01-04-2024	Pengelola Kepegawaian		SMA	IPA
109	LALU JAYA USMAN SAMSURIJAL	III/a	01-04-2024	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan		SMA A2	Biologi
110	LALU MUJMAN	III/a	01-04-2024	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		MA	IPS
111	LALU AGUS ADNAN	III/a	01-04-2024	Operator Alat Berat		SMA A.3	IPS
112	LALU ISHAK	III/a	01-04-2024	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jurang Sate Hulu)		SMA A.3	IPS
113	MUHAMAD ANDRIAN	III/a	01-04-2024	pengadministraasi umum		STM	Bangunan
114	MUHAMAD NASIR	III/a	01-04-2024	Pengadministrasi Umum (Sekretariat)		SLTA UMUM	IPA
115	MUNADI	III/a	01-08-2024	Pengadministrasi Umum		STM	Bangunan
116	SYAMSURRIJAL	II/d	01-04-2020	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (DI Surabaya)		MA A.3	IPS
117	DEDY ZULKARNAIN	II/d	01-04-2020	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA A.3	IPS

No.	NAMA	PANGKAT		JABATAN		PENDIDIKAN	JURUSAN
		Gol	TMT	JABATAN	TMT		
1	2	3	4	5	6	7	8
118	LALU TANAURAN	II/d	01-04-2020	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA A.3	IPS
119	RUSDI	II/d	01-04-2020	Penjaga Pintu Air		SMA A.2	Biologi
120	BAIQ NUR ASIAH	II/d	01-04-2021	Pengadministrasi Umum		SMA	IPS
121	LALU FATHUL HIDAYAT	II/d	01-04-2021	Pengadministrasi Umum		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
122	LALU SUYATNO	II/d	01-04-2021	Teknisi Keciptakaryaan		SMK	Bangunan
123	MASKAM	II/d	01-04-2021	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA	sMA
124	RUPLAN	II/d	01-04-2021	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan		MA	IPS
125	SYAFI ' I	II/d	01-04-2021	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMK	Pariwisata
126	MUHAMAD MANAN	II/d	01-04-2021	Pengeloa Sampel Pengujian		SMEA	Perdagangan
127	FATHUR	II/d	01-04-2021	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA	IPS
128	ABDUL HAPIZ	II/d	01-04-2021	Pemeliharaan Jalan		STM	Bangunan
129	UYUL MARTA DITIA ATMAJA	II/d	01-04-2022	Penjaga Pintu Air		SMU	IPA
130	M. NUR HIDAYAT	II/d	01-04-2022	Penjaga Pintu Air		SMU	IPS
131	INDRA EKAYANTI	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum		SMA A.3	IPS
132	KURNIATI	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum		SMA A.3	IPS
133	ROSMAYATI	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum		SMA A.3	IPS
134	SULISTIANINGSIH	II/d	01-04-2022	Pengolah daftar Gaji		MA	
135	BAIQ SRI ULAYANTI	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum		SMU	IPS
136	HIDAYANTI	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum		SMU	IPS
137	BAIQ REHANA	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum		SMEA	Perdagangan
138	BAIQ NILIWATI	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum		MA	
139	LALU IMAM SUMAWI	II/d	01-04-2022	Pemelihara Jalan		SMU	IPS
140	IDAYANTI	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum		SMU	IPS
141	HIJRIAH	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum		SMK	

No.	NAMA	PANGKAT		JABATAN		PENDIDIKAN	JURUSAN
		Gol	TMT	JABATAN	TMT		
1	2	3	4	5	6	7	8
142	LALU JUNAEDI	II/d	01-04-2022	Pengelola Sumber Daya Air		SMA A.3	IPS
143	KUSNAWIJAYA	II/d	01-10-2022	Pemelihara JAlan		STM	Bangunan
144	KABUL	II/c	01-10-2020	Penjaga Pintu Air		SMA.A2	Biologi
145	JAHRI	II/c	01-10-2020	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		Paket C	
146	NONOK IRHAM	II/c	01-10-2020	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA.A2	Biologi
147	SUPARDI	II/c	01-10-2020	Pengadministrasi Umum		Paket C	
148	I KETUT BUDAYA ADNYANA	II/c	01-10-2020	Penjaga Pintu Air		Paket C	
149	MUHAMAD HAMIRI	II/c	01-04-2021	Pengadministrasi Umum		MA	Ilmu-Ilmu Agama
150	MUHAMAD PAIZAN	II/c	01-04-2021	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	01-01-2022	SMA	IPS
151	AKHMAD C	II/c	01-04-2021	Penjaga Pintu Air		Paket B	
152	MAHSUN	II/c	01-04-2021	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		STM	Bangunan
153	NISPURWADI	II/c	01-04-2021	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA	IPS
154	KETUT WIJAYA KUSUMA, A.Md	II/c	01-03-2022	Pengelola Sumber Daya Air		D-III	Teknik Sipil
155	LALU MUHAMAD ZAELANI	II/c	01-10-2022	Pengolah Data Laporan Realisasi Anggaran		SMA	Ilmu-ilmu Biologi
156	LALU BUDI HERMAWAN	II/c	01-10-2022	Teknisi Gedung/Bangunan		SMA	Ilmu-ilmu Biologi
157	AKHIMUDIN	II/c	01-04-2023	Penjaga Pintu Air		SMP	
158	LALU SUHAIDI	II/c	01-04-2023	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA	Ilmu-ilmu Fisik
159	RAMDAN	II/c	01-04-2023	Penjaga Pintu Air (DAM Bunut Batukliang)		SMA	Pengetahuan Budaya

No.	NAMA	PANGKAT		JABATAN		PENDIDIKAN	JURUSAN
		Gol	TMT	JABATAN	TMT		
1	2	3	4	5	6	7	8
160	MINARIM	II/c	01-10-2023	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMP	
161	KHAIRIL ANWAR	II/c	01-10-2023	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMP	
162	HAYIN	II/c	01-04-2024	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		PAKET C	
163	LALU ZULKIFLI	II/c	01-04-2024	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana		SLTP	
164	BAIQ SRI RAHAYUNINGSIH	II/c	01-04-2024	Pramu Kebersihan		SLTP	
165	MANSUR BUDIAKA	II/c	01-04-2024	Operator Alat Berat		Paket C	
166	SASIH	II/c	01-04-2024	Penjaga Pintu Air		Paket C	
167	ABDUL AZIS	II/b	01-04-2020	Penjaga Pintu Air		SLTP	
168	AHMAD BADAWI	II/b	01-10-2021	Operator Alat Berat		Paket C	
169	ROMI IRWANTO	II/b	01-04-2021	Penjaga Kantor		SLTP	
170	QORIMAH	II/b	01-04-2024	Pengadministrasi Persuratan		Paket C	
171	WAHYU HIDAYAT	II/b	01-04-2024	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA	
172	MARZUKI	II/a	01-04-2021	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		paket C	
173	SAHRI	II/a	01-04-2023	Operator Alat Berat		SD	
174	LALU ISHAK	II/a	01-04-2023	Penjaga Pintu Air		SD	
175	I WAYAN PUJIARTA	II/a	01-04-2023	Pemelihara Jalan		Paket B	
176	MAHISUN	II/a	01-04-2023	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SD	
177	RAMDAN	II/a	01-04-2023	Penjaga Pintu Air		SMP	
178	LALU MAKMUN	II/a	01-04-2023	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMP	
179	JUMAAH	II/a	01-04-2023	Operator Alat Berat		SD	

No.	NAMA	PANGKAT		JABATAN		PENDIDIKAN	JURUSAN
		Gol	TMT	JABATAN	TMT		
1	2	3	4	5	6	7	8
180	NURIDIN	II/a	01-04-2023	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SD	
181	MASRIK	II/a	01-04-2024	Penjaga Pintu Air		SD	
182	LALU ANWAR	I/d	01-04-2020	Penjaga Pintu Air		SD	
183	AWALUDIN	I/d	01-04-2022	Penjaga Kantor		SD	
184	SUMARDAN	I/c	01-04-2021	Penjaga Kantor		SD	
185	HUSEN	I/c	01-10-2022	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SD	

Sumber: Data kepegawaian DPUPR Kabupaten Lombok Tengah (keadaan Agustus 2025).

Tabel 1.2 Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Berdasarkan jenis/kualifikasi jabatan (Keadaan Per Desember 2023)

NO	JENIS/KUALIFIKASI	JUMLAH
1.	ESELON :	
	II.a	1
	III.a	1
	III.b	4
	IV.a	2
	IV.b	2
2.	JABATAN FUNGSIONAL :	
	Perencana Ahli Pertama	1
	Teknik Tata Bangunan Ahli Muda	2
	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	1
	Teknik Pengairan Ahli Muda	3
	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	2
	Penata Ruang Ahli Muda	2
3.	PANGKAT/GOLONGAN :	
	Pembina (Golongan IV)	5
	Penata (Golongan III)	105
	Pengatur (Golongan II)	88
	Juru (Golongan I)	6
4.	JENJANG PENDIDIKAN :	
	S3	0
	S2	12
	S1/D.IV	48
	Sarjana Muda/D.I/D.II/D.II	2
	SMA sederajat	117
	SLTP Sederajat	14
	SD Sederajat	11

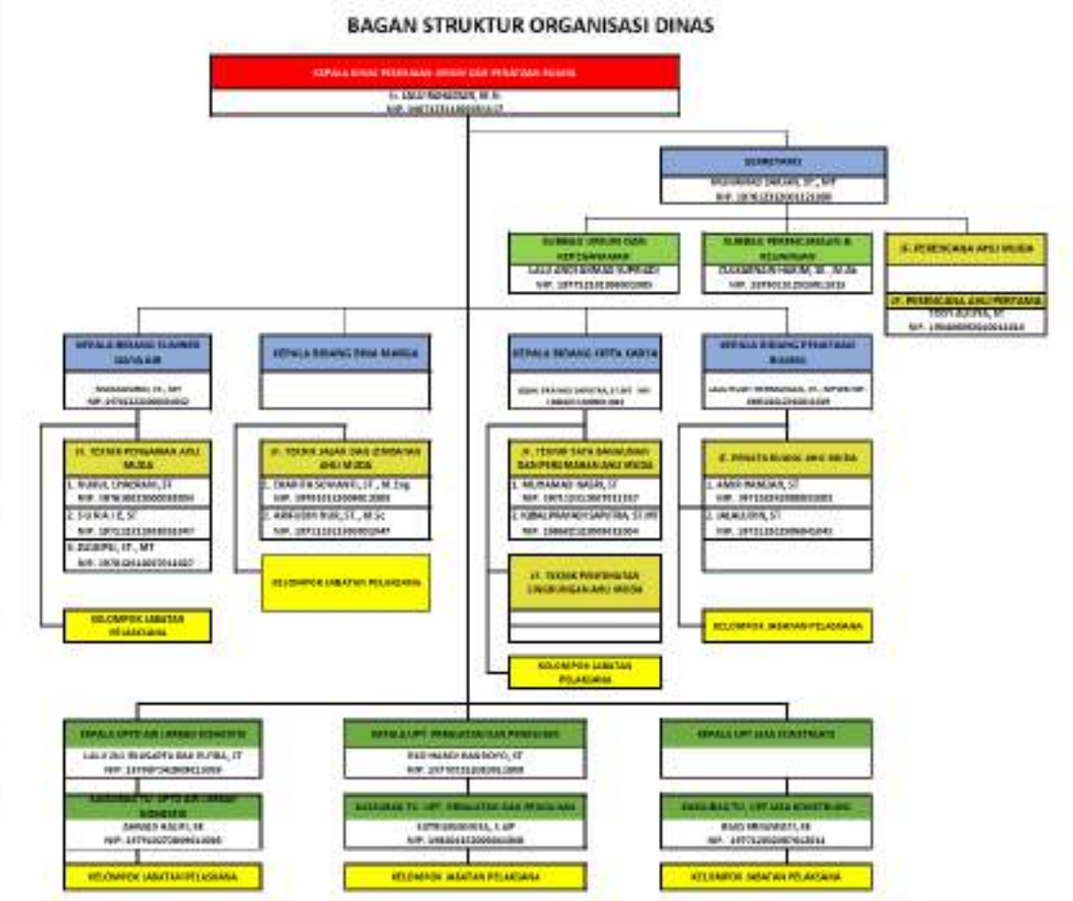
Sumber: Data kepegawaian DPUPR Kabupaten Lombok Tengah (keadaan Desember 2023).

I.3 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
    1. Bidang Sumber Daya Air membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
    2. Bidang Bina Marga membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
    3. Bidang Cipta Karya membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

4. Bidang Penataan Ruang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
5. Unit Pelaksana Teknis.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

Pejabat yang menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2026 (31 Januari 2026) pada lingkup Dinas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Pejabat Pemegang Perjanjian Kinerja Tahun 2026

No.	Jabatan	Nama
1	2	3
1	Kepala Dinas	Ir. Lalu Rahadian, M.Si
2	Sekretaris Dinas	Muhamad Sarjan, S.T., M.T.
3	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Munawardi, S.T., M.T.
4	Kepala Bidang Penataan Ruang	Lalu Rudy Hermawan, S.T., M.P.W.K.
5	Kepala Bidang Cipta Karya	Iqbal Prayadi Saputra, S.T., M.T.
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Zulkarnain Hakim, S.E., M.Ak.
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Lalu Andi Ahmad Supriadi
8	Kepala UPTD Peralatan dan Pengujian	Eko Handi Handoyo, S.T.
9	Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	Lalu Zul Ekasapta Rak Putra, S.T.
10	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Jasa Konstruksi	Baiq Ernawati, S.E.
11	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Peralatan dan Pengujian	Satriawangsa, S.A.P.
12	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	Ahmad Halifi, S.E.

Sumber: Perjanjian Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026. Jabatan Kepala Bidang Bina Marga ditangani oleh Sekretaris Dinas selaku penanggung jawab bidang, dan jabatan Kepala UPTD Jasa Konstruksi tidak terisi pada roster resmi.

I.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

I.4.1 Aspek Strategis

I.4.1.1 Visi

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025, visi pembangunan daerah adalah “Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Harmonis”, yang terangkai dalam akronim “MASMIRAH”. Visi tersebut ditopang empat pilar strategis, yaitu Mandiri (transformasi ekonomi berkelanjutan berbasis ekonomi hijau, biru, dan kreatif), Berdaya Saing (peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi generasi emas), Sejahtera (pemerataan kesejahteraan dan pembangunan kewilayahan), serta Harmonis (penguatan harmoni sosial dan budaya lokal).

Renstra DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada RPJMD tersebut, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, serta NSPK urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Peran DPUPR terhadap visi dan misi Kepala Daerah dijalankan melalui Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, dan Bidang Penataan Ruang.

I.4.1.2 Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 menetapkan lima misi pembangunan (Panca Asa) berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Generasi Emas, Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional, Inklusif, Mudah, Tepat Waktu dan Terjangkau;
3. Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan;

4. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antarwilayah; dan
5. Mengintegrasikan Nilai Akhlakul Karimah dan Nilai Budaya Luhur Dalam Kehidupan Bermasyarakat.

DPUPR terutama berkontribusi pada Misi 4 melalui Tujuan T.4.1 “Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Antarwilayah Secara Seimbang dan Berkelanjutan” dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (target 2026 sebesar 58,98), serta Sasaran S.4.1.1 “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah” dengan indikator Indeks Infrastruktur (target 2026 sebesar 58,55) dan Rasio Konektivitas (target 2026 sebesar 42,80). DPUPR juga mendukung Misi 2 melalui Sasaran S.2.1.1 tentang akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Pada tingkat Dinas, misi tersebut dijabarkan dalam Renstra menjadi satu tujuan dan tiga sasaran berikut:

1. Tujuan T.1: Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas, yang diukur dengan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI);
2. Sasaran S.1.1: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, yang diukur dengan Indeks Infrastruktur;
3. Sasaran S.1.2: Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Berkelanjutan, yang diukur dengan Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang; dan
4. Sasaran S.1.3: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, yang diukur dengan Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, DPUPR Kabupaten Lombok Tengah mengarahkan pembangunan infrastruktur agar dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai dengan tata ruang, melalui infrastruktur jalan, irigasi, air minum, sanitasi, dan bangunan gedung yang mantap, serta pengendalian dan pemanfaatan ruang kawasan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Lombok Tengah. Pada Triwulan II 2026, penyusunan RTRW dan RDTR masih menunggu pembahasan lintas sektor di kementerian sebagaimana dicatat pada Laporan Monev (Bab III).

I.4.1.3 Program Pembangunan

Sebagai upaya mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029, program-program yang menjadi prioritas terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Renstra Tahun 2025–2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

A. Urusan Pekerjaan Umum

1. Program Penyelenggaraan Jalan
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Permukiman
7. Program Penataan Bangunan Gedung
8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

B. Urusan Penataan Ruang

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

I.4.2 Isu Strategis Utama

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini yang dicantumkan di Renja DPUPR Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4 Isu Strategis Utama dan Pengaruh Perubahan Regulasi menurut Bidang

Bidang	Isu Utama	Pengaruh Perubahan Regulasi
Sumber Daya Air (SDA)	- Rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan irigasi	- Perubahan regulasi terkait pengelolaan sumber daya air dapat mempengaruhi prioritas dan alokasi anggaran untuk proyek irigasi. Misalnya, penyesuaian kebijakan nasional tentang pengelolaan sumber daya air dapat berdampak pada program irigasi di tingkat daerah.

Bidang	Isu Utama	Pengaruh Perubahan Regulasi
Bina Marga	- Sebagian besar ruas jalan kabupaten dalam kondisi tidak layak dan kritis (belum mantap) - Kurangnya ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas seperti rambu, marka, pengaman jalan, dan terminal	- Perubahan regulasi dalam UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang mengubah UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dapat mempengaruhi perencanaan dan pengelolaan infrastruktur jalan. Misalnya, perubahan dalam persyaratan izin dan persetujuan kegiatan penataan ruang dapat mempengaruhi proses perencanaan dan pembangunan jalan.
Cipta Karya	- Rendahnya cakupan pelayanan air minum - Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih relatif rendah - Masih terdapat rumah dan bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan standar kesehatan dan teknis bangunan - Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan	- Perubahan regulasi dalam UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang mengubah UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dapat mempengaruhi standar teknis dan persyaratan kesehatan untuk bangunan gedung. Misalnya, perubahan dalam persyaratan izin dan persetujuan kegiatan penataan ruang dapat mempengaruhi standar teknis dan persyaratan kesehatan untuk bangunan gedung.
Penataan Ruang	- Fungsi pengendalian dan penataan ruang yang belum konsisten - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan penataan ruang - Belum optimalnya pemanfaatan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam mengendalikan fungsi tata ruang - Belum optimalnya pemanfaatan lahan, terutama pada lahan kritis	- Perubahan regulasi dalam UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang mengubah UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dapat mempengaruhi mekanisme perizinan dan pengendalian tata ruang. Misalnya, perubahan dalam persyaratan izin dan persetujuan kegiatan penataan ruang dapat mempengaruhi mekanisme perizinan dan pengendalian tata ruang.
Sekretariat dan Umum	- Masih terdapat kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya yang belum optimal	- Perubahan regulasi yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan inklusi sosial dapat mempengaruhi kebijakan internal dan program DPUPR. Misalnya, penyesuaian kebijakan nasional tentang kesetaraan gender dapat berdampak pada program dan kebijakan internal DPUPR untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan infrastruktur.

Sumber: Renja DPUPR Tahun 2024, dan data olahan

Selain isu strategis di atas, pelaksanaan Triwulan II 2026 yang dicatat pada Laporan Monev (notulensi 4 Agustus 2026) menunjukkan permasalahan yang bersifat operasional, yaitu: (1) kesiapan teknis paket jembatan dan jalan, antara lain sondir awal yang tidak sesuai kondisi tanah dan penyesuaian mutu beton; (2) belum selesainya RISPAM sehingga Readiness Criteria DAK SPAM belum terpenuhi; (3) penetapan dokumen tata ruang yang menunggu pembahasan lintas sektor serta honorarium Forum Penataan Ruang yang belum tuntas; dan (4) konsistensi data

antara Renja, Monev, dan dokumen kontrak. Uraian dan tindak lanjutnya disajikan pada Bab III.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun[1]. Rencana Strategis (Renstra) DPUPR Kabupaten Lombok Tengah merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah (5 tahunan) yang di dalamnya memuat Visi dan Misi Jangka Menengah, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Sasaran Mutu Tahunan selama 5 tahun. Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), karena dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) akan membantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai tuntutan. Di samping itu Rencana Strategis (Renstra) akan memperjelas konsep Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara menyeluruh. Di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 tercakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan. Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra tersebut.

[1] Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

II.1.1 Visi[2]

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 ditetapkan visi pembangunan daerah, yaitu:

"Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Harmonis (MASMIRAH)"

Visi tersebut ditopang empat pilar strategis, yaitu Mandiri (transformasi ekonomi berkelanjutan berbasis ekonomi hijau, biru, dan kreatif), Berdaya Saing (peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi generasi emas), Sejahtera (pemerataan kesejahteraan dan pembangunan kewilayahan), dan Harmonis (penguatan harmoni sosial dan budaya lokal). Secara harfiah, "MASMIRAH" bermakna permata yang menggambarkan Kabupaten Lombok Tengah sebagai aset berharga bagi warganya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dalam mendukung visi tersebut perlu menyiapkan dukungan yang memadai berupa sarana dan prasarana yang mampu menampung seluruh aktivitas individu maupun kelompok dalam rangka menuju tercapainya visi Kabupaten Lombok Tengah. Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi yang memuat indikator kinerja dan target pencapaian.

II.1.2 Misi[3]

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut dan memberikan arah serta tujuan yang ingin dicapai, guna memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan maupun menumbuhkan partisipasi semua pihak, RPJMD menetapkan lima misi pembangunan daerah (Panca Asa) sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Generasi Emas, Sehat dan Cerdas;

[2] Renstra DPUPR Tahun 2025–2029 dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025)
[3] Renstra DPUPR Tahun 2025–2029 dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025)

2. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional, Inklusif, Mudah, Tepat Waktu dan Terjangkau;
3. Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan;
4. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antarwilayah; dan
5. Mengintegrasikan Nilai Akhlakul Karimah dan Nilai Budaya Luhur Dalam Kehidupan Bermasyarakat.

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkontribusi terutama pada Misi 4 dan Misi 2, dengan keterkaitan sebagai berikut:

a. Misi 4, Tujuan T.4.1 “Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Antarwilayah Secara Seimbang dan Berkelanjutan” dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur; Sasaran S.4.1.1 “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah” dengan indikator Indeks Infrastruktur dan Rasio Konektivitas; Sasaran S.4.1.2 tentang akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; serta Sasaran S.4.1.3 tentang resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim;
b. Misi 2, Sasaran S.2.1.1 “Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah” dengan indikator Nilai Implementasi SAKIP.

Selain itu, Renstra DPUPR menyelaraskan sasaran dengan sasaran RPJMN yang relevan, yaitu meningkatkan ketahanan air untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air, serta terlaksananya pembangunan daerah sesuai rencana tata ruang.

II.1.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

II.1.3.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Disini mengandung arti bahwa tercapainya faktor penentu keberhasilan sangat tergantung dari pencapaian tujuan tersebut.

Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kabupaten Lombok Tengah yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program Dinas Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah secara umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah untuk periode 2025–2029 menetapkan 1 (satu) Tujuan dengan 3 (tiga) Sasaran yang menjabarkan Misi 4 RPJMD. Perbandingan target Renstra dengan target RPJMD dan Perjanjian Kinerja disajikan pada Bab II.4 (Tabel 2.5). Tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan Jangka Menengah Tahun 2025–2029
Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator	Rumus/Formulasi	Satuan	Baseline	TARGET						Sumber Data
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.T.1	T.1 Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Sesuai dokumen perhitungan IKLI (basis hitung perlu dipastikan, lihat Bab III)	Indeks	51,65	52,68	53,91	56,40	58,81	61,71	64,76	Tabel IKU; PK 2026

Penanggung jawab: Kepala Dinas. Sumber: Renstra DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 (Tabel Tujuan Renstra PD).

II.1.3.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu yang ingin dicapai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi program/kegiatan.

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Jangka Menengah Tahun 2025–2029
Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator	Rumus/Formulasi	Satuan	Baseline	TARGET						Sumber Data
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.S.1	S.1.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	Rata-rata tertimbang tujuh komponen (konektivitas, irigasi, jalan, air minum, sanitasi, internet, listrik) menurut bobot SK Metodologi	Poin	55,45	60,89	63,33	65,63	68,35	71,20	74,28	Tabel IKU; SK Metodologi
I.S.2	S.1.2 Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	(Jumlah KKPR yang diterbitkan sesuai RTR ÷ Jumlah total KKPR yang diterbitkan) × 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	Laporan Kinerja Penataan Ruang; Tabel IKU
I.S.3	S.1.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP (evaluasi resmi tahunan)	Poin	66,84	72,00	73,04	75,56	77,03	79,15	80,12	Hasil evaluasi SAKIP; Tabel IKU

Penanggung jawab: Kepala Dinas. Baseline 2024 Indeks Infrastruktur menggunakan formulasi berbeda. Sumber: Renstra DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 (Tabel Sasaran Renstra PD).

II.2 RENCANA KERJA/KINERJA TAHUNAN

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Adapun Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 memuat target indikator outcome program sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026

No.	Program	Indikator Outcome	Satuan	Target Tahun 2026
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah	%	100,00
2	Program Pengelolaan SDA	Persentase Kondisi Irigasi Kab/Kota	%	88,69
3	Program SPAM	Ketahanan Air – RT akses air minum layak	%	95,81
4	Program SPAM	RT akses air minum SPAM perpipaan/non-perpipaan terlindungi	%	81,32
5	Program Air Limbah	RT akses air limbah domestik aman	%	88,93
6	Program Air Limbah	RT akses sanitasi aman	%	4,47
7	Program Drainase	Cakupan Drainase kondisi baik	%	21,46
8	Program Permukiman	Cakupan Infrastruktur Permukiman kondisi baik	%	100,00
9	Program Penataan Bangunan Gedung	Konsumsi listrik per kapita	kWh	374,69
10	Program Penataan Bangunan Gedung	Kepatuhan PBG dan SLF	%	100,00
11	Program Penataan Bangunan Gedung	Fasilitas pemda ber-EBT	%	1,51
12	Program Penataan Bangunan Gedung	Bangunan Gedung kondisi baik	%	100,00
13	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	100,00
14	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	%	76,786
15	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	%	21,57
16	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang	%	100,00

Sumber: Rencana Kerja (Renja) DPUPR Tahun 2026 dan Cetakan Evaluasi RENJA SKPD; target 2026 selaras dengan target program perangkat daerah pada RPJMD Tahun 2025–2029 (Bab IV) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

II.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU), atau Key Performance Indicator (KPI) merupakan indikator atau ukuran yang digunakan

untuk mengendalikan kinerja suatu organisasi, unit kerja, atau individu, dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan[4].

Tujuan utama dari IKU adalah:

1. Mengoptimalkan kegiatan perbaikan (improvement activities);
2. Meminimalisir kegiatan rutin; dan
3. Meminimalisir kegiatan tambahan yang tidak diperlukan.

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2023 Nomor 700/33/INSP/2023/RHS/Eva tanggal 13 Juli 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, pada poin Perencanaan dalam hal Penerapan Manajemen Kinerja, perlu dilakukan penyesuaian terkait IKU DPUPR Kabupaten Lombok Tengah. Penyesuaian tersebut telah dilakukan, dan IKU DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 terdiri atas empat indikator, yaitu Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI), Indeks Infrastruktur, Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, dan Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 serta disajikan dalam Lampiran.

II.4 PERJANJIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2026

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia[5].

[4] Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Negara, Tahun 2022

[5] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Perjanjian Kinerja (PK) DPUPR Tahun 2026 ditandatangani pada 31 Januari 2026, dimulai dari PK Kepala Dinas dengan Bupati Lombok Tengah, kemudian diturunkan secara berjenjang kepada Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD, hingga jabatan fungsional. Seluruhnya terdapat 24 dokumen PK, yaitu 13 PK pejabat struktural dan UPTD (termasuk PK Sekretaris selaku penanggung jawab Bidang Bina Marga) serta 11 PK bertanda (Revisi) yang terdiri dari jabatan fungsional dan jabatan pelaksana (PPPK). Perjanjian kinerja Tahun 2026 merupakan tahun kedua Renstra 2025–2029, sehingga capaian kinerja Tahun 2026 mencerminkan capaian Renstra 2025–2029. Pagu PK Kepala Dinas sebesar Rp65.534.457.578 menjadi dasar penghitungan serapan anggaran pada Bab III, sedangkan pagu Renja sebesar Rp128.635.240.462 digunakan sebagai pembanding. Rekapitulasi seluruh PK dan rincian anggarannya disajikan pada Lampiran Perjanjian Kinerja.

Tabel 2.4 Sasaran, Indikator, dan Target Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tahun 2026

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026
1	2	3	4
1	T.1 Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	52,68 (indeks)
2	S.1.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	60,89 (poin)
3	S.1.2 Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	100%
4	S.1.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	73,04 (poin)

Sumber: Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Kepala Dinas (31 Januari 2026), dengan sumber target Renstra DPUPR 2025–2030.

Target IKU pada PK perlu disandingkan dengan RPJMD dan Renstra agar ketiga dokumen perencanaan selaras. Perbandingan target IKU disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Perbandingan Target IKU pada RPJMD, Renstra, dan Perjanjian Kinerja

No.	Indikator Kinerja Utama	RPJMD		Renstra		PK 2026
		2026	2030	2026	2030	
1	2	3	4	5	6	7
1	IKLI	58,98	70,03	53,91	64,76	52,68
2	Indeks Infrastruktur	58,55	69,46	63,33 (SK)	74,28 (SK)	60,89
3	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	–	–	100	100	100
4	Nilai Implementasi SAKIP	77,06*	85,91*	73,04	80,12	73,04

**Indikator pada RPJMD adalah Nilai Implementasi SAKIP Pemerintah Daerah (tingkat kabupaten), sedangkan Renstra dan PK memuat nilai SAKIP Perangkat Daerah. Sumber: RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2025–2029 (Perda 4/2025), Tabel Sasaran Misi 2 dan Misi 4; Renstra DPUPR 2025–2029; PK Kepala Dinas Tahun 2026.*

Terdapat tiga catatan atas perbandingan tersebut. Pertama, target Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur pada Renstra (53,91) dan PK (52,68) lebih rendah daripada target RPJMD (58,98). Kedua, target Indeks Infrastruktur pada Renstra mengikuti SK Metodologi (63,33), sedangkan RPJMD memuat 58,55 dan PK memuat 60,89. Ketiga, nilai target IKLI dan Indeks Infrastruktur pada PK (52,68 dan 60,89) sama dengan target tahun 2025 pada Renstra, padahal sumber target PK dinyatakan sebagai kolom tahun 2026, sehingga perlu diverifikasi. Dengan realisasi Triwulan II 2026 sebesar 65,70 (IKLI) dan 61,89 (Indeks Infrastruktur), capaian terhadap target PK adalah 124,72% dan 101,64%, terhadap target RPJMD 111,39% dan 105,70%, serta terhadap target Renstra 121,87% dan 97,73%. Bab III menggunakan target Renstra/SK sebagai pengukuran yang lebih ketat.

Tabel 2.6 Pagu Indikatif RPJMD dan Pagu Perjanjian Kinerja Tahun 2026 menurut Program

No.	Program	Pagu Indikatif RPJMD 2026	Pagu PK 2026	PK terhadap RPJMD
1	2	3	4	5
1	1.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp29.488.306.000	Rp22.940.166.863	77,79%
2	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp7.091.247.000	Rp2.755.824.162	38,86%

No.	Program	Pagu Indikatif RPJMD 2026	Pagu PK 2026	PK terhadap RPJMD
3	1.03.03 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp13.662.195.000	Rp4.986.825.000	36,50%
4	1.03.05 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp2.805.129.000	Rp2.291.839.610	81,70%
5	1.03.06 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp1.515.616.000	Rp0	0,00%
6	1.03.07 Program Pengembangan Permukiman	Rp7.113.236.000	Rp0	0,00%
7	1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung	Rp27.105.687.000	Rp4.601.326.160	16,98%
8	1.03.09 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp2.200.000.000	Rp0	0,00%
9	1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan	Rp57.757.392.000	Rp27.609.777.563	47,80%
10	1.03.11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp101.343.000	Rp33.975.220	33,52%
11	1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp757.300.000	Rp314.723.000	41,56%
	Total	Rp149.597.451.000	Rp65.534.457.578	43,81%

Sumber: RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2025–2029 (Bab IV, Urusan 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) dan PK Kepala Dinas Tahun 2026. Program Drainase, Permukiman, serta Penataan Bangunan dan Lingkungannya tidak dianggarkan pada PK 2026. Pagu Renja sebesar Rp128.635.240.462 setara 85,99% dari pagu indikatif RPJMD.

Perjanjian kinerja Kepala Dinas diturunkan kepada pejabat Eselon III melalui indikator yang berkontribusi terhadap IKU Kepala Dinas. Keterkaitan tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Keterkaitan IKU Kepala Dinas dengan Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III

No.	Pejabat	Indikator Kinerja pada PK	Kontribusi terhadap IKU Kepala Dinas
1	2	3	4
1	Sekretaris Dinas	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah: 100%	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah; IKLI. Mengoordinasikan penyusunan, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi IKU, serta menjaga keselarasan RPJMD–Renstra–Renja–PK
2	Kepala Bidang Bina Marga (ditangani Sekretaris Dinas)	Tingkat Kemantapan Jalan: 76,786%	Indeks Infrastruktur (komponen jalan): koordinasi pendataan kondisi jalan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi capaian
3	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kab/Kota: 88,69%	Indeks Infrastruktur (komponen irigasi): koordinasi survei, pendataan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi kondisi irigasi

No.	Pejabat	Indikator Kinerja pada PK	Kontribusi terhadap IKU Kepala Dinas
4	Kepala Bidang Cipta Karya	Akses air minum, air limbah, sanitasi aman, PBG & SLF, dan bangunan gedung (6 indikator)	Indeks Infrastruktur (komponen air minum/SPAM, sanitasi/SPALD, dan bangunan gedung PBG/SLF)
5	Kepala Bidang Penataan Ruang	Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang: 100%	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang: rekomendasi teknis pemanfaatan ruang, kesesuaian KKPR dengan RTRW/RDTR, dan sinkronisasi OSS-RBA

Sumber: Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2026 masing-masing pejabat (bagian Keterkaitan dengan Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas).

II.5 KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA

Dalam konteks perencanaan dan pengelolaan kinerja suatu organisasi, terdapat keterkaitan antara dokumen perencanaan Renstra (Rencana Strategis), RKT (Rencana Kerja Tahunan), dan Perjanjian Kinerja. Berikut adalah hubungan dan keterkaitan antara ketiga dokumen tersebut.

1. Rencana Strategis (Renstra)

   a. Renstra adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang merinci visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi untuk beberapa tahun ke depan (biasanya dalam rentang 3-5 tahun).
   b. Renstra memberikan arah strategis bagi organisasi dan menentukan fokus utama yang harus dicapai dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

2. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

   a. RKT merupakan dokumen perencanaan operasional yang dihasilkan berdasarkan Renstra. RKT merinci kegiatan-kegiatan spesifik, target, dan alokasi sumber daya untuk satu tahun tertentu.
   b. RKT harus selaras dengan tujuan dan strategi yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga pelaksanaan kegiatan tahunan dapat mendukung pencapaian tujuan jangka panjang.

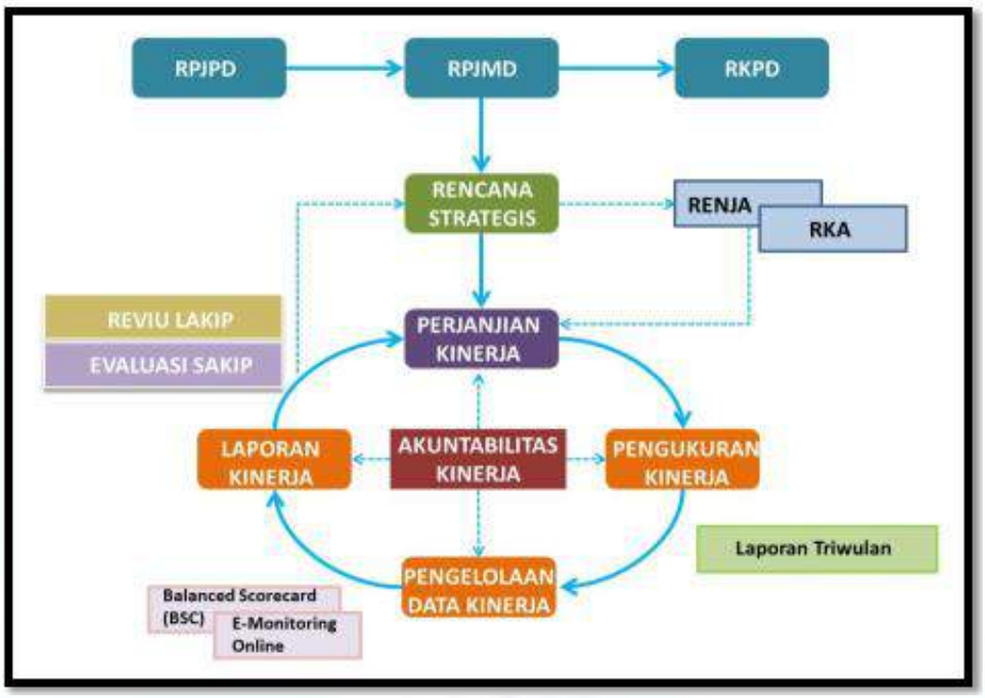
3. Perjanjian Kinerja

a. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang mengikat antara pimpinan unit kerja atau individu dengan atasan atau pihak yang memberikan tanggung jawab. Dokumen ini berisi target kinerja yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu.
b. Perjanjian Kinerja sebaiknya mencerminkan prioritas dan tujuan organisasi yang tercantum dalam Renstra dan RKT. Oleh karena itu, perjanjian kinerja seharusnya memperkuat pelaksanaan RKT dan, secara lebih luas, mencapai tujuan jangka panjang yang terdapat dalam Renstra.

Keterkaitannya ketiga dokumen perencanaan kinerja itu terhubungkan oleh pola sebagai berikut.

a. Renstra memberikan landasan strategis untuk RKT dan perjanjian kinerja. RKT dikembangkan berdasarkan Renstra, dan perjanjian kinerja seharusnya mencerminkan target dan prioritas yang ditetapkan dalam RKT.
b. RKT dan perjanjian kinerja bersifat lebih operasional dan spesifik dibandingkan Renstra, tetapi konsistensi antara ketiganya harus dijaga untuk memastikan pencapaian tujuan secara efektif.

Dengan menjaga keterkaitan yang baik antara Renstra, RKT, dan perjanjian kinerja, organisasi dapat memastikan bahwa setiap tingkat perencanaan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang, sekaligus memastikan bahwa sumber daya dan usaha fokus pada hal-hal yang benar-benar strategis dan relevan.



Gambar II-1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah

II.6 DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dokumen Perjanjian Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 dari seluruh pemegang perjanjian disajikan dalam Lampiran Perjanjian Kinerja. Sesuai catatan hasil reviu Inspektorat atas Laporan Kinerja Tahun 2025, uraian perjanjian kinerja disajikan dalam laporan ini dan dokumennya dilampirkan. Beberapa indikator pada PK jabatan pelaksana bertanda (*) merupakan usulan penyusun yang perlu divalidasi oleh pihak kedua melalui dialog kinerja.

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Lampiran ini merekapitulasi Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 yang ditandatangani pada 31 Januari 2026. Perjanjian kinerja dimulai dari Kepala Dinas dengan Bupati Lombok Tengah (H. Lalu Pathul Bahri, S.IP), kemudian diturunkan secara berjenjang kepada Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD, dan jabatan fungsional. Seluruhnya terdapat 24 dokumen PK, yaitu 13 PK pejabat struktural dan UPTD serta 11 PK bertanda (Revisi) untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana (PPPK).

Pagu PK Kepala Dinas sebesar Rp65.534.457.578 terdiri dari delapan program. Pagu tersebut sama dengan jumlah pagu pada PK Sekretaris Dinas (Rp22.940.166.863), Kepala Bidang (Rp27.609.777.563 untuk Bina Marga, Rp2.755.824.162 untuk Sumber Daya Air, Rp11.879.990.770 untuk Cipta Karya, dan Rp314.723.000 untuk Penataan Ruang), serta Kepala UPTD Jasa Konstruksi (Rp33.975.220).

Tabel P.1 Rekapitulasi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 menurut Pemegang Perjanjian

No.	Pemegang Perjanjian (Pihak Pertama)	Atasan (Pihak Kedua)	Sasaran / Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target 2026	Anggaran 2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Kepala Dinas Ir. Lalu Rahadian, M.Si	Bupati Lombok Tengah (H. Lalu Pathul Bahri, S.IP)	T.1 Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	52,68 (indeks)	Rp65.534.457.578
			S.1.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	60,89 (poin)	
			S.1.2 Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	100%	
			S.1.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	73,04 (poin)	
2	Sekretaris Dinas Muhamad Sarjan, S.T., M.T.	Kepala Dinas	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah	100%	Rp22.940.166.863
3	Sekretaris Dinas (selaku penanggung jawab Bidang Bina Marga) Muhamad Sarjan, S.T., M.T.	Kepala Dinas	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	76,786%	Rp27.609.777.563
4	Kepala Bidang Sumber Daya Air Munawardi, S.T., M.T.	Kepala Dinas	Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kab/Kota	88,69%	Rp2.755.824.162
5	Kepala Bidang Penataan Ruang Lalu Rudy Hermawan, S.T., M.P.W.K.	Kepala Dinas	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	100%	Rp314.723.000
6	Kepala Bidang Cipta Karya	Kepala Dinas	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Ketahanan Air - Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	95,81%	Rp11.879.990.770

No.	Pemegang Perjanjian (Pihak Pertama)	Atasan (Pihak Kedua)	Sasaran / Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target 2026	Anggaran 2026
	Iqbal Prayadi Saputra, S.T., M.T.		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	81,32%	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik aman	88,93%	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	4,47%	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	100%	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	100%	
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Zulkarnain Hakim, S.E., M.Ak.	Sekretaris Dinas	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp15.883.509.629
			Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	
			Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	
			Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	
			Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	

No.	Pemegang Perjanjian (Pihak Pertama)	Atasan (Pihak Kedua)	Sasaran / Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target 2026	Anggaran 2026
			Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	
			Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	
			Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	
			Terlaksananya manajemen administrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117 Orang/bulan	
			Terlaksananya manajemen administrasi keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	
			Terlaksananya manajemen administrasi keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Lalu Andi Ahmad Supriadi	Sekretaris Dinas	Terlaksananya manajemen administrasi barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Rp7.056.657.234
			Terlaksananya manajemen administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	
			Terlaksananya manajemen administrasi umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	
			Terlaksananya manajemen administrasi umum	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	
			Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	

No.	Pemegang Perjanjian (Pihak Pertama)	Atasan (Pihak Kedua)	Sasaran / Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target 2026	Anggaran 2026
			Terlaksananya penyediaan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
			Terlaksananya penyediaan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
			Terlaksananya pemeliharaan BMD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	
			Terlaksananya pemeliharaan BMD	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	8 Unit	
9	Kepala UPTD Peralatan dan Pengujian Eko Handi Handoyo, S.T.	Kepala Dinas	Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	8 Unit	Rp300.950.274
10	Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Lalu Zul Ekasapta Rak Putra, S.T.	Kepala Dinas	Tersedianya jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1.000 Rumah Tangga	Rp10.859.610
11	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Jasa Konstruksi Baiq Ernawati, S.E.	Kepala Dinas	Terlaksananya pelatihan tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	50 Orang	Rp33.975.220
12	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Peralatan dan Pengujian Satriawangsa, S.A.P.	Kepala UPTD Peralatan dan Pengujian	Administrasi ketatausahaan UPTD terlaksana tertib	Persentase rencana hasil kerja terselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100% (*)	Dikelola pimpinan unit
13	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Ahmad Halifi, S.E.	Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	Sarana pengangkutan lumpur tinja tersedia dan siap operasional	Persentase rencana hasil kerja terselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100% (*)	Dikelola pimpinan unit
14	Perencana Ahli Muda (Revisi)	Sekretaris Dinas	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp184.550.000

No.	Pemegang Perjanjian (Pihak Pertama)	Atasan (Pihak Kedua)	Sasaran / Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target 2026	Anggaran 2026
	Tody Auliya, S.T.		Terlaksananya evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	
			Terselenggaranya walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	
15	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama (PPPK) (Revisi) Neni Sollatiyah, S.M.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai tersedia berkala	Persentase rencana hasil kerja terselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100% (*)	Dikelola pimpinan unit
16	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Revisi) Arifudin Nur, S.T., M.Sc.	Sekretaris Dinas (selaku penanggung jawab Bidang Bina Marga)	Terlaksananya survey kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	500 KM	Rp5.085.000
17	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Revisi) Ekanita Sovianti, S.T., M.Eng.	Sekretaris Dinas (selaku penanggung jawab Bidang Bina Marga)	Tersusunnya rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2 Dokumen	Rp6.040.220
18	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda (Revisi) Zulkipli, S.T., M.T.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Terlaksananya peningkatan jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	31,67 KM	Rp929.597.000
			Terlaksananya penguatan kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	30 Lembaga	
19	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda (Revisi) Suraje, S.T.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Terlaksananya rehabilitasi jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	28,5 KM	Rp1.797.137.162
			Terlaksananya operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	26,40 KM	
20	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda (Revisi) Nurul Chairani, S.T.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Tersusunnya dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	7 Dokumen	Rp29.090.000
21	Penata Ruang Ahli Muda (Revisi) Amir Hamzah, S.T.	Kepala Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	300 Layanan	Rp62.000.000

No.	Pemegang Perjanjian (Pihak Pertama)	Atasan (Pihak Kedua)	Sasaran / Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target 2026	Anggaran 2026
22	Penata Ruang Ahli Muda (Revisi) Jalaludin, S.T., M.T.	Kepala Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	2 Kasus	Rp62.835.000
23	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda (Revisi) Muhamad Nasri, S.T.	Kepala Bidang Cipta Karya	Terselenggaranya penerbitan PBG, SLF, SBKBG, RTB, TPA, TPT, Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan PBG, SLF, SBKBG, RTB, TPA, TPT, Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	120 Dokumen	Rp5.585.000
24	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda (Revisi) Rahmat Irawan, S.T., M.T.	Kepala Bidang Cipta Karya	Terlaksananya pembangunan sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	100 m^3/Hari	Rp2.280.980.000

Keterangan: (*) indikator/target usulan penyusun (ukuran ketepatan waktu atau kontribusi kolektif) karena tidak tersedia target individual pada Renja/Renstra; wajib divalidasi pihak kedua melalui dialog kinerja sebelum ditandatangani. Sumber target Kepala Dinas: Renstra DPUPR 2025–2030, kolom tahun 2026. Sumber: Perjanjian Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026.

Tabel P.2 Rincian Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2026 menurut Program/Subkegiatan

No.	Pemegang Perjanjian	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran 2026
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Ir. Lalu Rahadian, M.Si	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp22.940.166.863
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp2.755.824.162
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp4.986.825.000
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp2.291.839.610
		Program Penataan Bangunan Gedung	Rp4.601.326.160
		Program Penyelenggaraan Jalan	Rp27.609.777.563
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp314.723.000
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp33.975.220
		Jumlah	Rp65.534.457.578
2	Sekretaris Dinas Muhamad Sarjan, S.T., M.T.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp22.940.166.863

No.	Pemegang Perjanjian	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran 2026
3	Sekretaris Dinas (selaku penanggung jawab Bidang Bina Marga) Muhamad Sarjan, S.T., M.T.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp27.609.777.563
4	Kepala Bidang Sumber Daya Air Munawardi, S.T., M.T.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp2.755.824.162
5	Kepala Bidang Penataan Ruang Lalu Rudy Hermawan, S.T., M.P.W.K.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp314.723.000
6	Kepala Bidang Cipta Karya Iqbal Prayadi Saputra, S.T., M.T.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp4.986.825.000
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp2.291.839.610
		Program Penataan Bangunan Gedung	Rp4.601.326.160
		Jumlah	Rp11.879.990.770
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Zulkarnain Hakim, S.E., M.Ak.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp225.302.538
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp15.658.207.091
		Jumlah	Rp15.883.509.629
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Lalu Andi Ahmad Supriadi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp3.324.900
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp9.480.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp136.879.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp3.630.040.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp2.760.154.080
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp516.779.254
		Jumlah	Rp7.056.657.234
9	Kepala UPTD Peralatan dan Pengujian Eko Handi Handoyo, S.T.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rp300.950.274
10	Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Lalu Zul Ekasapta Rak Putra, S.T.	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rp10.859.610
11	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Jasa Konstruksi Baiq Ernawati, S.E.	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Rp33.975.220
12	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Peralatan dan Pengujian Satriawangsa, S.A.P.	Mendukung kegiatan unit kerja	Dikelola pimpinan unit
13	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Ahmad Halifi, S.E.	Mendukung kegiatan unit kerja	Dikelola pimpinan unit
14	Perencana Ahli Muda Tody Auliya, S.T.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp13.540.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp168.310.000

No.	Pemegang Perjanjian	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran 2026
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Rp2.700.000
		Jumlah	Rp184.550.000
15	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama (PPPK) Neni Sollatiyah, S.M.	Mendukung kegiatan unit kerja	Dikelola pimpinan unit
16	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Arifudin Nur, S.T., M.Sc.	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Rp5.085.000
17	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Ekanita Sovianti, S.T., M.Eng.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rp6.040.220
18	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda Zulkipli, S.T., M.T.	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp885.427.000
		Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp44.170.000
		Jumlah	Rp929.597.000
19	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda Suraje, S.T.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp1.566.548.500
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp230.588.662
		Jumlah	Rp1.797.137.162
20	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda Nurul Chairani, S.T.	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Rp29.090.000
21	Penata Ruang Ahli Muda Amir Hamzah, S.T.	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Rp62.000.000
22	Penata Ruang Ahli Muda Jalaludin, S.T., M.T.	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Rp62.835.000
23	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda Muhamad Nasri, S.T.	Penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, TPA, TPT, Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Rp5.585.000
24	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda Rahmat Irawan, S.T., M.T.	Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Rp2.280.980.000

Sumber: Perjanjian Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Peralatan dan Pengujian, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan Analis SDM Aparatur Ahli Pertama mendukung kegiatan unit kerja dan anggarannya dikelola pimpinan unit.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Pengukuran Triwulan II mengikuti PK 2026, Renstra, SK Metodologi, Renja, dan DPA. Capaian dihitung dengan Capaian = Realisasi ÷ Target × 100% untuk indikator yang semakin tinggi semakin baik. IKU berupa indeks atau persentase level sehingga dibandingkan langsung dengan target tahunan. Kategori memakai skala Perbup 84/2024: ≤50% Sangat Rendah; 51–65% Rendah; 66–75% Sedang; 76–90% Tinggi; >91% Sangat Tinggi.

Evaluasi Triwulan II berfungsi sebagai pengendalian dini pada pertengahan tahun: apakah program, kegiatan, dan anggaran masih berada pada jalur sasaran tahunan. Karena jadwal kontrak dan target triwulanan belum ditetapkan, kemajuan keluaran Semester I tidak dibandingkan dengan 50% target tahunan. Fokusnya adalah perubahan dari Triwulan I, kecocokan keluaran dengan anggaran yang terserap, serta kendala yang tercatat pada Monev Triwulan II.

III.1.1 Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama DPUPR Triwulan II Tahun 2026

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian thd Target Triwulan II	Capaian thd Target Tahunan	Status Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	T.1 Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas	IKLI (I.T.1)	Indeks (0–100)	53,91	Tidak ditetapkan terpisah	65,70	121,87%	121,87%	Sangat Tinggi; tidak berubah dari Tw I (65,70); basis hitung perlu dipastikan	Tabel IKU Tw II; PK; SK
2	S.1.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Berbobot (I.S.1)	Poin (0–100)	63,33 (SK)	Tidak ditetapkan terpisah	61,89	97,73%	97,73%	Sangat Tinggi menurut skala, tetapi kurang 1,44 poin dari target 2026; tidak berubah dari Tw I. Seri PK/Renstra (58,55): 105,70%	Tabel IKU Tw II; SK
3	S.1.2 Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (I.S.2)	%	100	Tidak ditetapkan terpisah	100	100%	100%	Sangat Tinggi; stabil	Tabel IKU Tw II; PK
4	S.1.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Implementasi SAKIP PD (I.S.3)	Poin (0–100)	73,04	Tidak ditetapkan terpisah	72	98,58%	98,58%	Sangat Tinggi menurut skala, tetapi kurang 1,04 poin dari target 2026; tidak berubah	Tabel IKU Tw II; PK

Rumus: Capaian = Realisasi Tw II ÷ Target 2026 × 100%. Target triwulanan tidak ditetapkan terpisah.

Perkembangan IKU. Keempat IKU tidak berubah dari Triwulan I. Untuk SAKIP hal ini wajar karena nilainya hasil evaluasi resmi tahunan (72, kurang 1,04 poin dari target 2026). Untuk IKLI (65,70) dan Indeks Infrastruktur (61,89), nilai yang sama selama dua triwulan menunjukkan bahwa pengukuran belum merekam perubahan akibat pelaksanaan fisik Triwulan II. Sebagai hasil perhitungan, capaian IKLI 121,87% dan Indeks Infrastruktur 97,73% (seri SK) tetap sama. Dengan demikian pengaruh paket fisik yang mulai selesai pada Triwulan II (72 paket Pokir Bina Marga, 15 paket irigasi, 20 paket air limbah menurut Monev) belum terlihat pada nilai indeks. Hal ini bukan bukti bahwa program tidak berkontribusi, melainkan indikasi bahwa indeks diukur dari data yang diperbarui dengan jeda lebih panjang atau dari data komponen yang belum diperbarui; dugaan ini perlu dikonfirmasi oleh pengelola data.

Komponen Indeks Infrastruktur. Menurut bobot SK, kenaikan rencana 2026 terutama berasal dari Konektivitas (±1,04 poin, 43%), Irigasi (±0,59 poin, 24%), Air Minum (±0,25), Sanitasi (±0,21), Jalan (±0,20), dan Internet (±0,15). Pada Triwulan II, komponen yang menunjukkan kemajuan keluaran berasal dari Irigasi dan Jalan, sedangkan Konektivitas, Internet, dan Listrik tetap tidak memiliki indikator pada PK bidang. Dengan demikian sumber utama kenaikan rencana indeks belum terkait dengan program yang berjalan.

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang. Realisasi tetap 100%. Layanan KKPR pada Renja 62 pada Triwulan II sehingga kumulatif 224 dari target tahunan 300 (74,67%). Di sisi lain, Monev mencatat 38 dari 245 permohonan dikembalikan (tercatat pada bahan Monev dan belum dipastikan periodenya) serta honorarium Forum Penataan Ruang yang belum tuntas dan berpotensi menghambat PKKPR.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Outcome Program Triwulan II Tahun 2026 (Renja)

No.	Program	Indikator Outcome	Target 2026	Realisasi 2025	Realisasi Tw I	Realisasi Tw II	Capaian thd Target 2026	Status Kinerja	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penunjang	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	25,00	50,00	50,00%	Kemajuan kumulatif; belum dapat dinilai	Naik dari 25,00 (Tw I); indikator kemajuan, bukan formula.
2	Program SDA	Persentase Kondisi Irigasi Kab/Kota (%)	88,69	95,12	89,53	89,53	100,95%	Sangat Tinggi	Sama dengan Tw I.
3	Program SPAM	Ketahanan Air – RT akses air minum layak (%)	95,81	97,09	97,09	97,09	101,34%	Sangat Tinggi (sementara)	Sama dengan Tw I dan realisasi 2025.
4	Program SPAM	RT akses air minum SPAM perpipaan/non-perpipaan terlindungi (%)	81,32	80,59	80,59	80,59	99,10%	Sangat Tinggi (sementara)	Sama dengan Tw I dan realisasi 2025.
5	Program Air Limbah	RT akses air limbah domestik aman (%)	88,93	88,18	88,18	88,18	99,16%	Sangat Tinggi (sementara)	Sama dengan Tw I dan realisasi 2025.
6	Program Air Limbah	RT akses sanitasi aman (%)	4,47	3,10	3,19	3,33	74,50%	Sedang	Naik 0,14 dari Tw I.
7	Program Drainase	Cakupan Drainase kondisi baik (%)	21,46	20,15	0,00	0,00	Belum dapat dihitung	Belum ada data	Nilai 0 pada Tw I dan II; program tidak beranggaran 2026 (PK) atau tanpa pengukuran.
8	Program Permukiman	Cakupan Infrastruktur Permukiman kondisi baik (%)	100,00	97,00	0,00	0,00	Belum dapat dihitung	Belum ada data	Nilai 0 pada Tw I dan II; program tidak beranggaran 2026 (PK) atau tanpa pengukuran.
9	Program Gedung	Konsumsi listrik per kapita (kWh)	374,69	284,75	284,75	284,75	76,00%	Sedang (sementara)	Sama dengan Tw I dan realisasi 2025. PK: di luar kendali langsung Bidang Cipta Karya.
10	Program Gedung	Kepatuhan PBG dan SLF (%)	100,00	85,91	100,00	100,00	100,00%	Sangat Tinggi	Sama dengan Tw I.
11	Program Gedung	Fasilitas pemda ber-EBT (%)	1,51	0,70	0,70	0,70	46,36%	Sangat Rendah (sementara)	Sama dengan Tw I dan realisasi 2025. PK: di luar kendali langsung Bidang Cipta Karya.

No.	Program	Indikator Outcome	Target 2026	Realisasi 2025	Realisasi Tw I	Realisasi Tw II	Capaian thd Target 2026	Status Kinerja	Catatan
12	Program Gedung	Bangunan Gedung kondisi baik (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	Sangat Tinggi (sementara)	Sama dengan Tw I dan realisasi 2025.
13	Program Penataan B&L	Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	Sangat Tinggi (sementara)	Sama dengan Tw I dan realisasi 2025.
14	Program Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	76,79	76,88	76,87	76,87	100,11%	Sangat Tinggi	Sama dengan Tw I.
15	Program Jasa Konstruksi	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%)	21,57	20,90	0,00	0,00	Belum dapat dihitung	Belum ada data	Nilai 0 pada Tw I dan II; program tidak beranggaran 2026 (PK) atau tanpa pengukuran.
16	Program Penataan Ruang	Penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang (%)	100,00	100,00	25,00	50,00	50,00%	Kemajuan kumulatif; belum dapat dinilai	Naik dari 25,00 (Tw I); indikator kemajuan, bukan formula.

Sumber: Cetakan Evaluasi RENJA SKPD (kolom Triwulan I dan II). Status memakai skala Perbup 84/2024 terhadap target tahunan.

Perubahan dari Triwulan I hanya terjadi pada tiga indikator: RT akses sanitasi aman naik dari 3,19% menjadi 3,33% (74,50% target 2026, kategori Sedang), serta indikator kemajuan Pencapaian IKU PD dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ruang yang masing-masing naik dari 25% menjadi 50%. Sanitasi aman masih kurang 1,14 poin dari target 2026. Indikator lain tidak berubah, dan lima di antaranya identik dengan realisasi 2025. Drainase, Permukiman, dan Tenaga Kerja Konstruksi Ahli tetap tidak memiliki data. Capaian pada tabel ini adalah hasil perhitungan indikator, dibedakan dari kemajuan fisik paket pada Tabel 3.4.

Tabel 3.3 Capaian dan Permasalahan Pelaksanaan Triwulan II menurut Monev (4 Agustus 2026)

Bidang	Capaian Triwulan II (Monev)	Permasalahan
1	2	3
Bina Marga	72 dari 92 paket Pokir selesai; kontrak Agustus 89%	Paket urgent Desa Pringgarata baru 40% dari batas 17 Agustus. Jembatan Aik Bual 0,3% dari rencana 2% (deviasi −1,7%) akibat perbedaan jenis tanah dan kedalaman tanah keras dari sondir awal. Jalan Kidang–Semoyan 0,87% dari target 2,28% karena penyesuaian mutu beton dan MC-0 belum selesai. Jembatan Pokir baru 20%.
Cipta Karya (Air Limbah)	Progres fisik 97,73%; 20 paket PHO	RISPAM belum selesai sehingga Readiness Criteria DAK SPAM Cerorong Danau Biru (Rp2 miliar) belum terpenuhi. Pelaporan DAK baru 27%. Operator lalai mengisi laporan di 4 lokasi.
Sumber Daya Air	11 paket rehabilitasi irigasi PHO (progres 63%, serapan 83%); 4 paket peningkatan jaringan PHO (progres 82%)	EFAKSI baru 5%. OP irigasi belum dilaksanakan.
Penataan Ruang	Verifikasi LBS 43.534,85 Ha (87,36% dari 49.000 Ha)	Penetapan dokumen tata ruang menunggu pembahasan lintas sektor di Kementerian. Honorarium anggota FPR belum tuntas dan berpotensi menghambat PKKPR.
UPT Air Limbah	Sanitasi aman naik dari 2,75% menjadi 3,4% (Semester I); pilot L2T2 melibatkan 100 pelanggan	Pemanfaatan belum optimal: suplai 3 m³/hari dari kapasitas 25 m³/hari, target efektivitas 14 m³/hari.
Monev	Forum evaluasi lintas bidang tersedia dan menghasilkan arahan tindak lanjut	Kelengkapan dan ketepatan waktu pelaporan belum optimal.

Sumber: Laporan Monev 2026, notulensi 4 Agustus 2026. Keterangan ini adalah catatan Monev dan belum direkonsiliasi dengan dokumen kontrak.

III.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Pembanding yang tersedia: Triwulan I 2026, baseline 2024–2025 (Renstra/PK), dan baseline SK. Data Triwulan II 2025 dan 2021–2023 tidak tersedia. Set indikator 2026 berbeda dari laporan 2025, sehingga angka Bab III 2025 tidak dibandingkan.

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Triwulan II 2026 dengan Triwulan I 2026, 2025, dan 2024

Indikator	2024	2025	Tw I 2026	Tw II 2026	Δ Tw I→Tw II	Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
IKLI	51,65	52,68	65,70	65,70	0,00	Tidak berubah; lonjakan sejak Tw I perlu validasi
Indeks Infrastruktur (basis SK)	–	60,89	61,89	61,89	0,00	Tidak berubah; +1,00 dari baseline SK
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	100	100	100	100	0,00	Stabil pada target
Nilai Implementasi SAKIP	66,84	72,00	72,00	72,00	0,00	Tidak berubah; hasil evaluasi resmi tahunan
RT akses sanitasi aman (%)	–	3,10	3,19	3,33	+0,14	Naik; masih 1,14 poin di bawah target 2026
Pencapaian IKU Perangkat Daerah (%)	–	100	25	50	+25,00	Indikator kemajuan
Penyelesaian kasus pelanggaran ruang (%)	–	100	25	50	+25,00	Indikator kemajuan; 0 kasus baru pada Tw II

Sumber: Renstra Tabel 4.7 dan PK (2024–2025), SK Metodologi, tabel IKU Tw II, Cetakan Evaluasi RENJA SKPD.

Tidak ada perubahan pada empat IKU selama Triwulan II; perubahan terukur hanya pada sanitasi aman (+0,14 poin) dan dua indikator kemajuan. Satu-satunya perubahan yang dapat dikaitkan dengan keluaran adalah sedot lumpur tinja yang meningkat (147 RT pada Tw I menjadi 221 RT pada Tw II), tetapi kontribusinya terhadap sanitasi aman belum dapat dibuktikan secara kuantitatif.

III.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Rumus: Selisih = Realisasi − Target akhir; Persentase = Realisasi ÷ Target akhir × 100%; Sisa capaian = Target akhir − Realisasi bila positif. Aturan risiko: (a) Rendah bila realisasi ≥95% target 2026 dan kesenjangan ke 2030 ≤5%; (b) Sedang bila realisasi ≥95% target 2026 dan kesenjangan >5% sampai 15%; (c) Tinggi bila realisasi <95% target 2026 atau kesenjangan >15%; (d) naik satu

tingkat bila kenaikan tahunan yang dibutuhkan melebihi rata-rata kenaikan jalur target; (e) Kritis bila indikator tidak berpagu atau tanpa data.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Terakhir dengan Target Akhir Renstra (2030)

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama/Outcome	Realisasi Terakhir (Tw II 2026)	Target Akhir Renstra 2030	Selisih thd Target Akhir	% thd Target Akhir	Sisa Capaian	Status Pencapaian	Tingkat Risiko	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	T.1 Akses Infrastruktur Berkualitas	IKLI	65,70	64,76	+0,94	101,45%	0,00	Tercapai (sementara)	Rendah	Terlampaui; risiko pada validitas basis hitung.
2	S.1.1 Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Berbobot (seri SK)	61,89	74,28	−12,39	83,32%	12,39	Belum tercapai	Tinggi	Kesenjangan 16,7% target; kebutuhan 3,10 poin/tahun melampaui jalur SK 2,74/tahun.
3	S.1.2 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	100	100	0,00	100%	0,00	Tercapai	Rendah	Pemeliharaan capaian; RTRW/RDTR menunggu lintas sektor.
4	S.1.3 Akuntabilitas Kinerja	Nilai Implementasi SAKIP	72	80,12	−8,12	89,87%	8,12	Belum tercapai	Tinggi	Kebutuhan 2,03 poin/tahun melampaui jalur 1,77; target 2026 belum terpenuhi.
5	Program Penunjang	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (%)	50,00	100,00	n/a	n/a	n/a	Belum dapat dinilai	Sedang	Kemajuan 50%; target Tw belum ada.
6	Program SDA	Persentase Kondisi Irigasi Kab/Kota (%)	89,53	100,00	-10,47	89,53%	10,47	Belum tercapai	Sedang	Gap 10,47 poin; kondisi turun 5,59 dari 2025; kebutuhan 2,62/tahun vs jalur 2,83.
7	Program SPAM	Ketahanan Air – RT akses air minum layak (%)	97,09	98,93	-1,84	98,14%	1,84	Belum tercapai	Rendah	Gap 1,84 poin; sama dengan 2025.
8	Program SPAM	RT akses air minum SPAM perpipaan/non-perpipaan terlindungi (%)	80,59	84,24	-3,65	95,67%	3,65	Belum tercapai	Rendah	Gap 3,65 poin; sama dengan 2025.
9	Program Air Limbah	RT akses air limbah domestik aman (%)	88,18	91,93	-3,75	95,92%	3,75	Belum tercapai	Rendah	Gap 3,75 poin; sama dengan 2025.

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama/Outcome	Realisasi Terakhir (Tw II 2026)	Target Akhir Renstra 2030	Selisih thd Target Akhir	% thd Target Akhir	Sisa Capaian	Status Pencapaian	Tingkat Risiko	Keterangan
10	Program Air Limbah	RT akses sanitasi aman (%)	3,33	12,52	-9,19	26,60%	9,19	Belum tercapai	Tinggi	74,50% target 2026; kebutuhan 2,30/tahun vs jalur 2,01.
11	Program Drainase	Cakupan Drainase kondisi baik (%)	Tidak ada data	23,15	n/a	n/a	n/a	Belum dapat dinilai	Kritis	Program tidak beranggaran 2026 (PK); tanpa data.
12	Program Permukiman	Cakupan Infrastruktur Permukiman kondisi baik (%)	Tidak ada data	100,00	n/a	n/a	n/a	Belum dapat dinilai	Kritis	Program tidak beranggaran 2026 (PK); tanpa data.
13	Program Gedung	Konsumsi listrik per kapita (kWh)	284,75	435,17	-150,42	65,43%	150,42	Belum tercapai	Tinggi	76,00% target 2026; kebutuhan 37,60/tahun vs jalur 15,12. Di luar kendali langsung (PK).
14	Program Gedung	Kepatuhan PBG dan SLF (%)	100,00	100,00	+0,00	100,00%	0,00	Tercapai (sementara)	Rendah	Capaian 100%; loncatan dari 85,91 (2025) perlu verifikasi.
15	Program Gedung	Fasilitas pemda ber-EBT (%)	0,70	6,26	-5,56	11,18%	5,56	Belum tercapai	Tinggi	46,36% target 2026; kebutuhan 1,39/tahun vs jalur 1,19. Di luar kendali langsung (PK).
16	Program Gedung	Bangunan Gedung kondisi baik (%)	100,00	100,00	+0,00	100,00%	0,00	Tercapai (sementara)	Rendah	Pemeliharaan capaian 100%.
17	Program Penataan B&L	Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)	100,00	100,00	+0,00	100,00%	0,00	Tercapai (sementara)	Sedang	Capaian 100% tetapi program tidak beranggaran 2026 (PK).
18	Program Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	76,87	81,17	-4,30	94,71%	4,30	Belum tercapai	Sedang	Gap 4,30 poin (5,3%); anggaran Jalan terserap 11,42% PK; kebutuhan 1,07/tahun vs jalur 1,10.
19	Program Jasa Konstruksi	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%)	Tidak ada data	25,25	n/a	n/a	n/a	Belum dapat dinilai	Tinggi	Tanpa data; target 2026 (21,57) di atas realisasi 2025 (20,90).
20	Program Penataan Ruang	Penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang (%)	50,00	100,00	n/a	n/a	n/a	Belum dapat dinilai	Sedang	Kemajuan 50%; 6 kasus terdeteksi pada Tw I, 0 pada Tw II.

Sumber: tabel IKU Tw II; SK Metodologi; PK dan Renstra; Cetakan Evaluasi RENJA SKPD. Baris 1–4 IKU; baris 5–20 outcome program.

Analisis. (1) Jarak: IKLI dan Kesesuaian sudah di atas atau pada target 2030; Indeks Infrastruktur dan SAKIP masih 12,39 dan 8,12 poin di bawah. (2) Tren: dua titik historis belum cukup. (3) Sisa waktu empat tahun (2027–2030). (4) Kenaikan dibutuhkan 3,10 dan 2,03 poin per tahun. (5) Kelayakan: bergantung pada keluaran terbukti; pada Semester I keluaran konstruksi pada Renja masih nol sementara Monev mencatat paket selesai (V4). (6) Risiko: Indeks Infrastruktur dan SAKIP Tinggi; sanitasi aman Tinggi walau naik. (7) Implikasi: Renja 2027 perlu menyelaraskan komponen indeks dengan program berpagu.

Perubahan dari Triwulan I hanya pada sanitasi aman (sisa capaian menurun dari 9,33 menjadi 9,19 poin). Untuk indikator yang sudah mencapai target (IKLI, Kesesuaian, Bangunan Gedung baik), strategi diarahkan pada mempertahankan capaian dan memverifikasi data.

III.1.4 Analisis Proyeksi Pencapaian Indikator sampai Akhir Periode Renstra

Data historis tetap dua titik (2024–2025) ditambah dua realisasi 2026 yang identik, sehingga proyeksi numerik berbasis rata-rata atau median perubahan belum dapat dipertanggungjawabkan. Skenario konservatif: nilai tetap pada realisasi terakhir; moderat: kenaikan minimum per tahun agar tepat mencapai target 2030; optimistis tidak diangkakan. Ini perhitungan kebutuhan, bukan prediksi.

Tabel 3.6 Analisis Proyeksi Pencapaian Indikator sampai Akhir Periode Renstra

No.	Indikator	Realisasi Terakhir	Target Akhir Renstra	Sisa Capaian	Tren Historis	Skenario Konservatif	Skenario Moderat	Skenario Optimistis	Tingkat Risiko	Dasar Proyeksi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	IKLI	65,70	64,76	0,00	51,65 → 52,68 → 65,70 → 65,70	Tetap di 65,70; target terpenuhi	Fokus mempertahankan	Tidak disajikan	Rendah	Aritmetika; validitas basis hitung
2	Indeks Infrastruktur (seri SK)	61,89	74,28	12,39	60,89 → 61,89 → 61,89	Tetap di 61,89; kesenjangan 12,39	≥3,10/tahun; jalur SK 2,74/tahun	Tidak disajikan	Tinggi	Aritmetika dan jalur SK
3	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	100	100	0,00	100 → 100 → 100 → 100	Tetap 100	Tetap 100	Tidak disajikan	Rendah	Target pemeliharaan
4	Nilai Implementasi SAKIP	72	80,12	8,12	66,84 → 72 → 72 → 72	Tetap di 72; kesenjangan 8,12	≥2,03/tahun; jalur 1,77/tahun	Tidak disajikan	Tinggi	Aritmetika dan jalur Renstra
5	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	76,87	81,166	4,30	76,88 → 76,87 → 76,87	Tetap di 76,87; kesenjangan 4,30	≥1,07/tahun; jalur 1,10/tahun	Tidak disajikan	Sedang	Aritmetika; data Renja
6	Kondisi Irigasi (%)	89,53	100	10,47	95,12 → 89,53 → 89,53	Tetap di 89,53; kesenjangan 10,47	≥2,62/tahun; jalur 2,83/tahun	Tidak disajikan	Sedang	Aritmetika; data Renja
7	RT akses sanitasi aman (%)	3,33	12,52	9,19	3,10 → 3,19 → 3,33	Tetap di 3,33; kesenjangan 9,19	≥2,30/tahun; jalur 2,01/tahun	Tidak disajikan	Tinggi	Aritmetika; data Renja

Sumber: pengolahan penyusun dari SK Metodologi, Renstra, PK, tabel IKU Tw II, dan Cetakan Evaluasi RENJA SKPD.

Tidak ada indikator yang berubah tingkat risikonya dari Triwulan I. Risiko Tinggi bertahan pada Indeks Infrastruktur, SAKIP, dan sanitasi aman. Indikator utama tidak bergerak selama dua triwulan sementara keluaran fisik mulai selesai, sehingga risiko terbesar saat ini terletak pada keterkaitan antara keluaran dan nilai indeks, bukan hanya pada kecepatan pelaksanaan.

III.1.5 Strategi Korektif terhadap Indikator yang Berisiko Tidak Mencapai Target

Strategi disusun untuk indikator berisiko Tinggi dan Kritis serta indikator Sedang yang bergantung pada anggaran besar. Penanggung jawab mengikuti PK 2026. Strategi tidak mengubah target; kalibrasi diajukan hanya melalui reviu perencanaan. Status tindak lanjut Triwulan I tidak dapat ditelusuri pada Monev, sehingga strategi berikut dirumuskan ulang berdasarkan kondisi Triwulan II.

Tabel 3.7 Matriks Strategi Korektif Indikator Berisiko

No.	Indikator Berisiko	Kondisi Aktual	Target yang Belum Tercapai	Penyebab Utama	Strategi Korektif	Program/Kegiatan Pendukung	Penanggung Jawab	Waktu	Keluaran	Indikator Keberhasilan	Mekanisme Pemantauan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Infrastruktur (seri SK)	61,89; tidak berubah dari Tw I; 97,73% target 2026	Target 2026 63,33; sisa ke 2030: 12,39 poin	Nilai tidak merespons paket yang selesai pada Tw II; komponen Konektivitas (±43% kenaikan rencana) tidak memiliki pemilik data pada PK; nilai komponen tidak tersedia	Menetapkan pemilik dan jadwal pembaruan data tiap komponen; mencocokkan paket yang selesai dengan komponen jalan, irigasi, air minum, sanitasi	Jalan (1.03.10); Irigasi (1.03.02.2.02); SPAM; Air Limbah	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Zulkarnain Hakim, S.E., M.Ak.	Tw III 2026 (pemetaan); Renja 2027	Peta komponen–paket–pemilik data; nilai komponen Semester I	Seluruh 7 komponen memiliki pemilik dan nilai per triwulan	Reviu triwulanan; peringatan dini bila indeks tidak berubah dua triwulan
2	Nilai Implementasi SAKIP	72; 98,58% target 2026	Target 2026 73,04; sisa ke 2030: 8,12 poin	Tidak berubah; kelengkapan dan ketepatan pelaporan belum optimal (Monev Tw II); belum ada PIC dan checklist pelaporan	Menetapkan PIC dan checklist pelaporan; menutup temuan evaluasi sebelumnya menurut komponen berbobot terbesar	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD (1.03.01.2.01)	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Zulkarnain Hakim, S.E., M.Ak.; Sekretaris Dinas	Tw III–Tw IV 2026	Checklist pelaporan; matriks tindak lanjut evaluasi	100% laporan triwulanan tepat waktu; rekomendasi evaluasi terjadwal	Rapat monev bulanan

No.	Indikator Berisiko	Kondisi Aktual	Target yang Belum Tercapai	Penyebab Utama	Strategi Korektif	Program/Kegiatan Pendukung	Penanggung Jawab	Waktu	Keluaran	Indikator Keberhasilan	Mekanisme Pemantauan
3	RT akses sanitasi aman (%)	3,33; 74,50% target 2026	Target 2026 4,47; sisa ke 2030: 9,19 poin	SPALD berbasis masyarakat belum menghasilkan keluaran (0/100 m³/hari) meski Rp504 juta terserap; pemanfaatan IPLT/L2T2 belum optimal (suplai 3 dari 25 m³/hari)	Menetapkan target volume dan pelanggan L2T2; memastikan keluaran SPALD terukur; menyelesaikan syarat teknis IPLT	Sistem Air Limbah (1.03.05.2.01); SPALD (...0023); Sedot Lumpur Tinja (...0033)	Kepala Bidang Cipta Karya, Iqbal Prayadi Saputra, S.T., M.T.; UPT Air Limbah	Tw III–Tw IV 2026; Renja 2027	Target L2T2; kontrak dan progres SPALD	100 m³/hari terbangun; 1.000 RT tersedot (kumulatif 368)	Laporan bulanan UPT
4	Kemantapan Jalan	76,87; 100,1% target 2026	Sisa ke 2030: 4,30 poin	Rekonstruksi terserap Rp3,03 miliar tetapi Renja mencatat 0 km; Aik Bual 0,3% vs 2% (sondir awal tidak sesuai); Kidang–Semoyan 0,87% vs 2,28% (mutu beton, MC-0); Pringgarata 40%	Rekonsiliasi keluaran Renja–Monev; survei dan uji tanah sebelum DED; monitoring mingguan paket jembatan dan Kidang–Semoyan	Rekonstruksi Jalan (...0059); Penggantian Jembatan (...0057); Pemeliharaan Rutin (...0051)	Sekretaris Dinas (selaku PJ Bina Marga), Muhamad Sarjan, S.T., M.T.	Tw III 2026 (segera)	Laporan progres mingguan; berita acara rekonsiliasi	Paket jembatan dan Kidang–Semoyan sesuai jadwal kontrak; keluaran Renja terbarui	Monitoring fisik mingguan; deviasi dilaporkan per bulan

No.	Indikator Berisiko	Kondisi Aktual	Target yang Belum Tercapai	Penyebab Utama	Strategi Korektif	Program/Kegiatan Pendukung	Penanggung Jawab	Waktu	Keluaran	Indikator Keberhasilan	Mekanisme Pemantauan
5	Kondisi Irigasi (%)	89,53; turun 5,59 dari 2025	Sisa ke 2030: 10,47 poin	EFAKSI baru 5%; OP irigasi belum dilaksanakan; serapan 83% pada paket dengan progres 63% (Monev)	Menetapkan target EFAKSI; menjadwalkan OP; memeriksa selisih serapan dan progres fisik	Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (1.03.02.2.02)	Kepala Bidang SDA, Munawardi, S.T., M.T.	Tw III–Tw IV 2026	Jadwal EFAKSI dan OP; rekonsiliasi paket	OP 26,4 km; rehabilitasi 28,5 km (target Renja); deviasi fisik–serapan menurun	Laporan progres bulanan
6	Akses air minum (SPAM)	97,09 dan 80,59; sama dengan 2025	Gap 1,84 dan 3,65 poin ke 2030	Perluasan SPAM terserap 3,11% PK dengan 0 SR; RISPAM belum selesai sehingga RC DAK Cerorong Danau Biru (Rp2 miliar) belum terpenuhi; pelaporan DAK 27%	Menetapkan target penyelesaian RISPAM; PIC dan checklist pelaporan DAK	Perluasan SPAM (1.03.03.2.01.0032)	Kepala Bidang Cipta Karya, Iqbal Prayadi Saputra, S.T., M.T.	Tw III–Tw IV 2026	Dokumen RISPAM; checklist DAK	RISPAM selesai; pelaporan DAK lengkap	Rapat khusus RISPAM–RC
7	Drainase dan Permukiman	Tidak ada data; tidak beranggaran 2026 (PK)	Target 2026 21,46% dan 100%	Program tidak dianggarkan	Memasukkan ke bahan Renja 2027 dengan target terkalibrasi	Program 1.03.06 dan 1.03.07	Perencanaan (Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Zulkarnain Hakim, S.E., M.Ak.)	Renja 2027	Usulan program dan target	Keputusan penganggaran	Reviu Renja

Sumber: pengolahan penyusun dari SK Metodologi, PK 2026, Cetakan Evaluasi RENJA SKPD, dan Laporan Monev (notulensi 4 Agustus 2026).

Dapat dilaksanakan pada 2026: nomor 1 (pemetaan), 2, 3, 4, 5, dan 6. Diteruskan ke Renstra berikutnya: komponen Konektivitas pada Indeks Infrastruktur, target sanitasi aman, serta kalibrasi target Drainase dan Permukiman. Kalibrasi target Irigasi dan Kemantapan Jalan (target 2026 lebih rendah dari realisasi 2025) hanya melalui reviu perencanaan.

III.1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi dinilai dari hubungan sumber daya dengan keluaran dan kontribusi terhadap indikator. Serapan tinggi tidak otomatis efektif, serapan rendah tidak otomatis efisien, dan sisa anggaran belum dapat disebut penghematan sebelum penyebabnya diverifikasi. Pada Triwulan II tampak dua pola: serapan yang sudah tinggi pada belanja penunjang dan gedung tanpa keluaran sepadan, serta program konstruksi yang baru mulai terserap sementara keluarannya belum tercatat pada Renja.

III.1.6.1 Analisis Efisiensi Anggaran

Rumus: % realisasi keuangan = Realisasi kumulatif ÷ Pagu × 100%, terhadap pagu PK (riil) dan pagu Renja (pembanding). Realisasi fisik (indeks keluaran) = rata-rata (keluaran kumulatif s.d. Tw II ÷ target keluaran 2026), maksimum 100%, atas indikator keluaran subkegiatan bertarget >0. Deviasi = % fisik − % keuangan (terhadap PK). Target fisik memakai target tahunan (100%).

Tabel 3.8 Analisis Efisiensi Anggaran per Program sampai Triwulan II Tahun 2026

No.	Program	Pagu PK (Riil)	Realisasi Tw II	Realisasi s.d. Tw II	% thd Pagu PK	% thd Pagu Renja	Realisasi Fisik (indeks)	Deviasi Fisik–Keuangan (poin)	Keluaran/Output	Kontribusi terhadap IKU	Hasil Analisis Efisiensi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program Penunjang	Rp22.940.166.863	Rp11.693.343.000	Rp16.806.747.468	73,26%	51,11%	42,33%	−30,93	Gaji ASN 500 orang/bulan (target PK 117); laporan keuangan 8 (15); 1 laporan evaluasi; 0 gedung kantor	Tidak langsung	Serapan tinggi tidak otomatis efektif. Gaji ASN terserap 75,53% pagu Renja pada Semester I (V8). Pengadaan gedung kantor kumulatif Rp2,69 miliar dengan keluaran 0 unit.	Rinci belanja pegawai; verifikasi dasar pembayaran pengadaan
2	Program Pengelolaan SDA	Rp2.755.824.162	Rp1.079.531.000	Rp1.086.059.900	39,41%	27,18%	24,61%	−14,80	Rehabilitasi 14,32 km (50,2% target); peningkatan 9,48 km (29,9%); OP 0 km; 3 dokumen dukungan teknis	Kondisi Irigasi; Indeks Infrastruktur	Keluaran mulai ada; serapan lebih tinggi dari indeks fisik. Monev: serapan 83% dengan progres 63% pada 11 paket rehabilitasi (selisih −20 poin).	Rekonsiliasi paket; target EFAKSI dan OP

No.	Program	Pagu PK (Riil)	Realisasi Tw II	Realisasi s.d. Tw II	% thd Pagu PK	% thd Pagu Renja	Realisasi Fisik (indeks)	Deviasi Fisik–Keuangan (poin)	Keluaran/Output	Kontribusi terhadap IKU	Hasil Analisis Efisiensi	Tindak Lanjut
3	Program SPAM	Rp4.986.825.000	Rp154.915.000	Rp154.915.000	3,11%	2,12%	0,00%	−3,11	0 SR (target 1.000)	Akses air minum; Indeks Infrastruktur	Mulai terserap tanpa keluaran; RISPAM belum selesai (Monev).	Selesaikan RISPAM; jadwal kontrak
4	Program Air Limbah	Rp2.291.839.610	Rp511.167.000	Rp514.317.000	22,44 %	22,44 %	18,40%	−4,04	Sedot lumpur 368 RT (36,8%); SPALD 0 m³/hari	Sanitasi aman; Indeks Infrastruktur	Sedot lumpur efisien (92,5% biaya Rp10,0 juta untuk 36,8% target). SPALD terserap Rp504 juta tanpa keluaran pada Renja, sedangkan Monev mencatat progres 97,73% (V4).	Rekonsiliasi SPALD; target L2T2
5	Program Drainase	Rp0	Rp0	Rp0	n/a	n/a	n/a	n/a	Tidak ada	Drainase	Tidak beranggaran 2026 (PK).	Konfirmasi status
6	Program Pengembangan Permukiman	Rp0	Rp0	Rp0	n/a	n/a	n/a	n/a	Tidak ada	Permukiman	Tidak beranggaran 2026 (PK).	Konfirmasi status

No.	Program	Pagu PK (Riil)	Realisasi Tw II	Realisasi s.d. Tw II	% thd Pagu PK	% thd Pagu Renja	Realisasi Fisik (indeks)	Deviasi Fisik–Keuangan (poin)	Keluaran/Output	Kontribusi terhadap IKU	Hasil Analisis Efisiensi	Tindak Lanjut
7	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp4.601.326.160	Rp2.411.175.000	Rp3.837.048.250	83,39 %	21,36 %	50,00%	−33,39	PBG/SLF 123 dokumen (target 120); 0 dari 1 bangunan strategis dipelihara	Bangunan baik; PBG/SLF	Indeks fisik berasal dari PBG/SLF. Belanja pemeliharaan gedung strategis kumulatif Rp3,84 miliar tanpa keluaran: inefisiensi indikatif, penyebab belum terverifikasi.	Rinci komponen belanja; target keluaran
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp0	Rp0	Rp0	n/a	n/a	n/a	n/a	Tidak ada	Penataan B&L	Tidak beranggaran 2026 (PK).	Konfirmasi status

No.	Program	Pagu PK (Riil)	Realisasi Tw II	Realisasi s.d. Tw II	% thd Pagu PK	% thd Pagu Renja	Realisasi Fisik (indeks)	Deviasi Fisik–Keuangan (poin)	Keluaran/Output	Kontribusi terhadap IKU	Hasil Analisis Efisiensi	Tindak Lanjut
9	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp27.609.777.563	Rp3.133.501.000	Rp3.152.873.500	11,42%	4,94%	0,00%	−11,42	0 km rekonstruksi (16); 0 m jembatan (150); 0 km rutin (10)	Kemantapan Jalan; Indeks Infrastruktur	Rekonstruksi terserap Rp3,03 miliar tetapi keluaran Renja 0, sedangkan Monev mencatat 72 dari 92 paket Pokir selesai: keluaran Renja kemungkinan belum diperbarui (V4).	Rekonsiliasi keluaran; kawal paket jembatan
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp33.975.220	Rp3.348.000	Rp4.713.000	13,87%	13,87%	0,00%	−13,87	0 orang dilatih (target 50)	Tenaga kerja konstruksi ahli	Terserap tanpa keluaran; nilai kecil.	Jadwalkan pelatihan
11	Program Penataan Ruang	Rp314.723.000	Rp108.500.000	Rp143.634.666	45,64%	45,64%	58,22%	+12,58	KKPR 224 layanan (74,7%); 0 Perda RTRW; RDTR 2 dokumen teknis	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	KKPR efisien (Rp17,0 juta untuk 74,7% target). RTRW terserap Rp99,9 juta tanpa penetapan karena menunggu pembahasan lintas sektor (Monev).	Pertahankan KKPR; dokumen pendukung RTRW

No.	Program	Pagu PK (Riil)	Realisasi Tw II	Realisasi s.d. Tw II	% thd Pagu PK	% thd Pagu Renja	Realisasi Fisik (indeks)	Deviasi Fisik–Keuangan (poin)	Keluaran/Output	Kontribusi terhadap IKU	Hasil Analisis Efisiensi	Tindak Lanjut
	Total	Rp65.534.457.578	Rp19.095.480.000	Rp25.700.308.784	39,22 %	19,98 %	–	–	–	–	Di luar Penunjang: Rp8.893.561.316 (20,88% dari pagu PK Rp42,59 miliar).	–

Sumber: Cetakan Evaluasi RENJA SKPD (realisasi Tw I dan II; rupiah Tw II dibulatkan ribuan); PK 2026 Rev.1 (pagu riil). Indeks fisik dihitung penyusun.

Serapan kumulatif Semester I mencapai Rp25,70 miliar: 39,22% dari pagu PK dan 19,98% dari pagu Renja. Pada Triwulan II sendiri terserap Rp19,10 miliar atau hampir tiga kali Triwulan I (Rp6,60 miliar). Peningkatan terbesar berasal dari Penunjang (Rp11,69 miliar), Jalan (Rp3,13 miliar), dan Gedung (Rp2,41 miliar). Deviasi fisik–keuangan negatif pada sebagian besar program, yaitu serapan mendahului keluaran yang tercatat; hal ini dapat mencerminkan pembayaran awal, keluaran yang belum dicatat pada Renja (V4), atau keterlambatan. Ketiganya belum dapat dibedakan tanpa dokumen kontrak.

III.1.6.2 Analisis Efisiensi sampai Tingkat Program dan Kegiatan Prioritas

Prioritas dipilih dari nilai pagu besar, kontribusi terhadap IKU, dan selisih fisik–keuangan yang mencolok. Pagu subkegiatan ditampilkan menurut Renja dengan pembanding PK/DPA tingkat program atau kegiatan.

Tabel 3.9 Matriks Efisiensi Program/Kegiatan Prioritas sampai Triwulan II Tahun 2026

Program/Kegiatan Prioritas	IKU yang Didukung	Pagu (Renja vs PK/DPA)	Realisasi Keuangan s.d. Tw II	Progres Fisik	Keluaran	Penilaian Efisiensi	Faktor Penyebab	Dampak terhadap Kinerja	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rekonstruksi Jalan (1.03.10.2.01.0059)	Kemantapan Jalan; Indeks Infrastruktur	Renja Rp58.177.783.000; PK program Jalan Rp27.609.777.563	Rp3.031.773.000 (5,21% Renja)	0 dari 16 km (Renja); Monev: 72 dari 92 paket Pokir selesai	Renja 0 km	Belum dapat dinilai; keluaran Renja dan Monev tidak sejalan	Kesiapan teknis: sondir awal tidak sesuai tanah, mutu beton disesuaikan (Monev Tw II)	Kemantapan Jalan berisiko bila rekonsiliasi tidak dilakukan	Rekonsiliasi; selaraskan Renja–PK
Penggantian Jembatan (...0057)	Kemantapan Jalan; Indeks Infrastruktur	Renja Rp4.668.790.000	Rp735.500 (0,02%)	0 dari 150 m; Aik Bual 0,3% vs 2% (−1,7%)	0 m	Belum dapat dinilai	Sondir awal Aik Bual; jembatan Pokir 20% (Monev)	Risiko keterlambatan	Uji tanah sebelum DED; monitoring mingguan
Pemeliharaan Rutin Jalan (...0051)	Kemantapan Jalan	Renja Rp1.000.004.000 = DPA	Rp120.365.000 (12,04%)	0 dari 10 km (0%)	0 km	Serapan tanpa keluaran; belum efisien	Belum terdokumentasi pada Tw II	Pemeliharaan tidak menahan penurunan mantap	Verifikasi keluaran; target bertahap
Pemeliharaan Gedung Strategis (1.03.08.2.01.0018)	Bangunan gedung baik	Renja Rp17.955.873.000; DPA kegiatan Rp4.595.741.160; PK program Rp4.601.326.160	Rp3.837.048.250 (21,37% Renja; 83,4% PK program)	0 dari 1 bangunan (0%)	0 bangunan	Belanja tanpa keluaran: inefisiensi indikatif	Belum terdokumentasi	Capaian bangunan baik 100% perlu dijaga	Rinci komponen belanja; target keluaran
Pengadaan Gedung Kantor (1.03.01.2.07.0009)	Penunjang	Renja Rp11.559.663.000; DPA kegiatan Pengadaan BMD Rp3.630.040.000	Rp2.692.778.900 (23,30% Renja; 74,2% DPA kegiatan)	0 dari 2 unit (0%)	0 unit	Belanja tanpa keluaran	Belum terdokumentasi; Renja 3,2 kali DPA	Tidak langsung	Verifikasi dasar pembayaran

Program/Kegiatan Prioritas	IKU yang Didukung	Pagu (Renja vs PK/DPA)	Realisasi Keuangan s.d. Tw II	Progres Fisik	Keluaran	Penilaian Efisiensi	Faktor Penyebab	Dampak terhadap Kinerja	Rekomendasi
Gaji dan Tunjangan ASN (1.03.01.2.02.0001)	Penunjang (SDM)	Renja Rp15.499.887.000; PK Adm. Keuangan Rp15.658.207.091	Rp11.707.814.247 (75,53% Renja; 74,77% PK)	500 orang/bulan vs target PK 117	500	Serapan melampaui proporsi waktu 50% Semester I; target keluaran perlu direviu	Belum dijelaskan	Tidak langsung	Rincian komponen; reviu target
Perluasan SPAM (1.03.03.2.01.0032)	Akses air minum; Indeks Infrastruktur	Renja Rp7.286.825.000; DPA/PK SPAM Rp4.986.825.000	Rp154.915.000 (2,13% Renja; 3,11% PK)	0 dari 1.000 SR (0%)	0 SR	Belum dapat dinilai	RISPAM belum selesai; RC DAK belum terpenuhi; pelaporan DAK 27% (Monev)	Risiko target SR tidak tercapai	Selesaikan RISPAM; PIC dan checklist DAK
Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (1.03.02.2.02)	Kondisi Irigasi	Renja Rp3.995.824.000; PK SDA Rp2.755.824.162	Rp1.086.059.900 (27,18% Renja; 39,41% PK)	Rehabilitasi 14,32 km (50,2%); peningkatan 9,48 km (29,9%); OP 0	23,8 km	Keluaran mulai ada; serapan Monev (83%) melampaui progres (63%)	EFAKSI 5%; OP belum dilaksanakan (Monev)	Kondisi Irigasi belum membaik (89,53)	Prioritas OP; rekonsiliasi paket
SPALD Berbasis Masyarakat (1.03.05.2.01.0023)	Sanitasi aman	Renja Rp2.280.980.000 = DPA	Rp504.273.000 (22,11%)	0 dari 100 m³/hari; Monev: progres 97,73% pada paket air limbah	0 m³/hari	Belum dapat dinilai; keluaran Renja dan Monev tidak sejalan	Belum terdokumentasi; rekonsiliasi diperlukan	Risiko pada sanitasi aman	Rekonsiliasi keluaran
RTRW (...2.01.0011) dan KKPR (...2.03.0004)	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	RTRW Rp189.888.000; KKPR Rp62.000.000 (= DPA = PK)	Rp99.871.666 (52,60%); Rp16.962.000 (27,36%)	RTRW 0 dari 1; KKPR 224 dari 300 (74,7%)	0 Perda; 224 layanan	KKPR efisien; RTRW belum dapat dinilai	RTRW menunggu pembahasan lintas sektor; honorarium FPR belum tuntas (Monev)	Kesesuaian 100% terjaga; RTRW tertunda	Dokumen pendukung; anggaran FPR

Sumber: Cetakan Evaluasi RENJA SKPD; PK 2026 Rev.1; DPA 2026; Laporan Monev (notulensi 4 Agustus 2026).

III.1.6.3 Analisis Faktor Penyebab Efisiensi dan Inefisiensi

Tabel 3.10 Faktor Penyebab dan Status Pembuktian

Faktor	Bukti dalam Sumber	Status
1	2	3
Pendorong: paket terstandar selesai	72 paket Pokir Bina Marga, 15 paket irigasi, 20 paket air limbah selesai/PHO (Monev Tw II); forum evaluasi lintas bidang tersedia	Terverifikasi (Monev); belum direkonsiliasi dengan Renja
Kesiapan teknis dan desain	Sondir awal Aik Bual tidak sesuai kondisi tanah; mutu beton Kidang–Semoyan disesuaikan; MC-0 belum selesai	Terverifikasi (Monev Tw II)
Dokumen dan persyaratan	RISPAM belum selesai sehingga RC DAK belum terpenuhi; pelaporan DAK 27%	Terverifikasi (Monev Tw II)
Koordinasi lintas sektor	Penetapan dokumen tata ruang menunggu pembahasan di Kementerian; honorarium FPR belum tuntas	Terverifikasi (Monev Tw II)
Kelembagaan pelayanan	Pemanfaatan IPLT/L2T2: suplai 3 dari 25 m³/hari, target efektivitas 14 m³/hari	Terverifikasi (Monev Tw II)
Pelaporan dan data	Operator lalai di 4 lokasi; keluaran Renja dan Monev tidak sejalan; angka layanan KKPR berbeda	Fakta (selisih data); penyebab: hipotesis
Simpangan Renja terhadap PK	Pagu Renja 1,96 kali PK; serapan terhadap Renja tampak rendah (19,98%) padahal 39,22% terhadap PK	Fakta (data); penyebab: perlu konfirmasi
Pembayaran mendahului keluaran	Gedung strategis dan gedung kantor terserap tanpa keluaran; serapan irigasi (83%) melampaui progres (63%)	Fakta (data); penyebab: hipotesis (pembayaran awal)

Perubahan harga, produktivitas peralatan, dan koordinasi antarbidang lainnya belum dapat dinilai karena tidak ada data.

III.1.6.4 Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Analisis efisiensi SDM menilai kesesuaian jumlah pegawai, distribusi tugas, beban kerja, kompetensi, dan biaya pengembangan kapasitas dengan keluaran. Data jumlah pegawai per bidang, beban kerja, dan biaya pelatihan lengkap belum tersedia sehingga produktivitas dan kecukupan SDM belum dapat dinilai.

Berdasarkan data yang ada, pelatihan tenaga kerja konstruksi terserap Rp4.713.000 dari pagu Rp33.975.220 (13,87%) dengan 0 orang dilatih dari target 50; biaya per peserta belum dapat dihitung. Gaji dan Tunjangan ASN terserap Rp11,71 miliar pada Semester I (75,53% pagu Renja) dengan keluaran 500 orang/bulan terhadap target PK 117. Kedua angka itu belum dapat dibandingkan sebelum dipastikan apakah 117 merupakan jumlah pegawai, rata-rata per bulan, atau satuan lain. Monev Triwulan II juga mencatat kelalaian operator mengisi laporan di empat lokasi, yang menunjukkan perlunya penugasan dan kapasitas pelaporan. Tindak lanjut: memvalidasi jumlah pegawai aktif dan beban kerja per bidang, menyelaraskan satuan keluaran gaji ASN, menjadwalkan pelatihan, dan menetapkan PIC pelaporan. Hasil

sementara belum cukup untuk menyimpulkan SDM atau belanja pegawai tidak efisien.

III.1.6.5 Analisis Efisiensi Teknologi Informasi

Data waktu penyusunan laporan, ketepatan input, jumlah koreksi, dan biaya aplikasi belum tersedia, sehingga penghematan atau keberhasilan sistem informasi tidak diklaim. Bukti tidak langsung menunjukkan kebutuhan penguatan tata kelola data: keluaran Renja dan Monev tidak sejalan, angka layanan KKPR berbeda antarsumber, pelaporan DAK baru 27%, dan operator belum mengisi laporan di empat lokasi. Temuan ini mengindikasikan masalah konsistensi data, bukan bukti bahwa aplikasi tertentu menjadi penyebabnya.

Aspek	Indikator yang Diusulkan	Cara Pengukuran
1	2	3
Ketepatan waktu	Persentase laporan masuk sesuai tenggat	Laporan tepat waktu ÷ seluruh laporan wajib
Akurasi data	Jumlah koreksi data per triwulan	Log perubahan dan berita acara rekonsiliasi
Konsistensi data	Persentase kesesuaian data antarsumber	Membandingkan Renja, Monev, dokumen kontrak, dan laporan keuangan
Deteksi dini	Jumlah deviasi fisik–keuangan teridentifikasi sebelum evaluasi akhir	Hasil pemantauan berkala dan catatan tindak lanjut

Klaim efisiensi teknologi informasi baru dapat dibuat setelah tersedia data pembanding yang konsisten, pemilik data, dan standar waktu pembaruan.

III.1.6.6 Analisis Efisiensi melalui Inovasi Pelayanan

Data waktu dan biaya sebelum–sesudah inovasi belum tersedia sehingga penghematan tidak dinyatakan. Secara kualitatif, dua hal teridentifikasi: layanan KKPR menghasilkan 224 layanan dengan realisasi Rp16,96 juta (angka perlu direkonsiliasi dengan sumber lain), dan pilot L2T2 melibatkan 100 pelanggan dengan pemanfaatan baru 3 dari kapasitas 25 m^3/hari (target efektivitas 14 m^3/hari). Pilot L2T2 menunjukkan manfaat awal tetapi belum mencapai efektivitas yang ditargetkan. Indikator yang diusulkan: waktu layanan KKPR dan persentase tepat waktu, biaya per layanan, jumlah pelanggan dan volume L2T2 per bulan, serta persentase layanan yang memenuhi persyaratan pada pemeriksaan pertama.

III.1.6.7 Pemanfaatan Hasil Analisis Efisiensi untuk Perencanaan dan Penganggaran

Tabel 3.11 Pemanfaatan Hasil Analisis Efisiensi untuk Renja dan RKA

No.	Temuan Efisiensi/Inefisiensi	Program/Kegiatan Terkait	Implikasi terhadap IKU	Tindakan Perbaikan	Usulan Perencanaan Tahun Berikutnya	Implikasi Anggaran	Penanggung Jawab	Waktu Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Keluaran Renja tidak sejalan dengan Monev (Jalan, SPALD)	Jalan; Air Limbah	Pengukuran kinerja tidak mencerminkan paket yang selesai	Rekonsiliasi keluaran Renja–Monev–kontrak	Mekanisme pembaruan keluaran Renja tiap triwulan	Tidak ada	Perencanaan (Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Zulkarnain Hakim, S.E., M.Ak.)	Tw III 2026
2	Pagu Renja melampaui PK/DPA (Rp63,10 miliar)	Seluruh program yang bersimpangan	Serapan dan target keluaran terdistorsi	Rekonsiliasi pagu Renja–PK–DPA	Renja disusun dari plafon yang ditetapkan	Penyelarasan	Perencanaan	Renja 2027
3	Belanja tanpa keluaran (gedung)	1.03.08.2.01.0018; 1.03.01.2.07.0009	Bangunan baik 100% perlu dijaga	Verifikasi dasar pembayaran	Target keluaran bertahap per triwulan	Reviu pagu setelah verifikasi	Sekretaris Dinas; Kepala Bidang Cipta Karya, Iqbal Prayadi Saputra, S.T., M.T.	Tw III 2026
4	Serapan mendahului progres (irigasi 83% vs 63%)	Irigasi	Kondisi Irigasi	Rekonsiliasi paket	Pembayaran berbasis progres terverifikasi	Tidak ada	Bidang SDA	Tw III 2026
5	Kesiapan teknis (uji tanah, mutu beton, RISPAM)	Jalan/jembatan; SPAM	Kemantapan Jalan; akses air minum	Uji tanah sebelum DED; RISPAM selesai	Survei dan uji tanah sebelum DED; RISPAM sebagai dasar usulan SPAM	Dana survei dan RISPAM dalam plafon	Bina Marga; Cipta Karya	Renja 2027
6	Target volume L2T2 dan pelanggan belum ada	Air Limbah	Sanitasi aman	Tetapkan target L2T2	Target volume L2T2 pada Renja 2027	Biaya operasional UPT	UPT Air Limbah; Kepala Bidang Cipta Karya, Iqbal Prayadi Saputra, S.T., M.T.	Renja 2027
7	Layanan KKPR berbiaya kecil	1.03.12.2.03.0004	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Pertahankan layanan; selesaikan anggaran FPR	Alokasi honorarium FPR sejak awal tahun	Kebutuhan kecil	Kabid Penataan Ruang	Berkelanjutan

Seluruh implikasi anggaran adalah usulan analisis, bukan keputusan yang telah disetujui.

III.1.7 Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pemetaan memakai Renja untuk realisasi, PK untuk tujuan, sasaran, dan target, serta Monev untuk faktor pelaksanaan. Kontribusi terhadap indikator dinyatakan potensial; kesamaan waktu tidak dijadikan bukti sebab-akibat.

Tabel 3.12 Matriks Kontribusi Program/Kegiatan terhadap IKU

No.	Tujuan/Sasaran	IKU yang Didukung	Program	Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target (2026)	Realisasi Fisik s.d. Tw II	Realisasi Keuangan s.d. Tw II	Kontribusi terhadap IKU	Faktor Pendorong/Penghambat	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	S.1.1 Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur; IKLI; Kemantapan Jalan	Penyelenggaraan Jalan	Rekonstruksi; Penggantian Jembatan; Pemeliharaan Rutin	Km/m jalan dan jembatan	16 km; 150 m; 10 km	0% (Renja); Monev: 72/92 paket Pokir	Rp3.152.873.500 (11,42% PK)	Potensial; belum dapat dibuktikan	Pendorong: paket Pokir selesai; Penghambat: sondir, mutu beton (Monev)	Rekonsiliasi; kawal jembatan
2	S.1.1 Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur; Kondisi Irigasi	Pengelolaan SDA	Rehabilitasi; Peningkatan; OP Irigasi	Km jaringan	28,5; 31,67; 26,4 km	24,61% (indeks)	Rp1.086.059.900 (39,41% PK)	Potensial; keluaran 23,8 km	Pendorong: 15 paket PHO; Penghambat: EFAKSI, OP (Monev)	Prioritas OP; rekonsiliasi
3	S.1.1 Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur (Air Minum 0,27)	SPAM	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Sambungan Rumah	1.000 SR	0%	Rp154.915.000 (3,11% PK)	Potensial; belum ada keluaran	Penghambat: RISPAM, RC DAK (Monev)	Selesaikan RISPAM
4	S.1.1 Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur (Sanitasi 0,22); sanitasi aman	Air Limbah	SPALD; sedot lumpur tinja; IPLT	m^3/hari; RT	100 m^3/hari; 1.000 RT	18,40% (indeks)	Rp514.317.000 (22,44% PK)	Parsial: 368 RT (36,8%)	Pendorong: 20 paket PHO (Monev); Penghambat: L2T2 (Monev)	Target L2T2; rekonsiliasi
5	S.1.1 Kualitas Infrastruktur	Bangunan baik; PBG/SLF	Penataan Bangunan Gedung	Pemeliharaan Gedung Strategis; PBG/SLF	Bangunan; dokumen	1 bangunan; 120 dokumen	50,00% (indeks)	Rp3.837.048.250 (83,39% PK)	Parsial: 123 dokumen PBG/SLF	Pendorong: layanan PBG; Penghambat: belanja tanpa keluaran	Rinci belanja
6	S.1.2 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	RTRW; KKPR; Pengendalian	Layanan; dokumen; kasus	300 layanan; 1 Perda; 2 kasus	58,22% (indeks)	Rp143.634.666 (45,64% PK)	Mendukung: 224 layanan KKPR (74,7%)	Penghambat: lintas sektor; FPR (Monev)	Pertahankan KKPR
7	T.1 Akses Infrastruktur Berkualitas	Tenaga kerja konstruksi ahli	Jasa Konstruksi	Pelatihan Tenaga Kerja	Orang dilatih	50 orang	0%	Rp4.713.000 (13,87% PK)	Belum ada keluaran	Belum terdokumentasi	Jadwalkan pelatihan

No.	Tujuan/Sasaran	IKU yang Didukung	Program	Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target (2026)	Realisasi Fisik s.d. Tw II	Realisasi Keuangan s.d. Tw II	Kontribusi terhadap IKU	Faktor Pendorong/Penghambat	Rekomendasi
8	S.1.3 Akuntabilitas Kinerja	SAKIP; Pencapaian IKU PD	Penunjang	Perencanaan; Evaluasi Kinerja; Administrasi	Dokumen/laporan	Beragam	42,33% (indeks)	Rp16.806.747.468 (73,26% PK)	Mendukung operasional; kontribusi SAKIP belum terbukti	Penghambat: pelaporan (Monev)	PIC dan checklist
9	S.1.1 (Drainase, Permukiman, Penataan B&L)	Drainase; Permukiman; Penataan B&L	Tiga program	–	–	–	n/a	Rp0	Tidak terdukung anggaran 2026	Fakta PK	Reviu penganggaran
10	S.1.1 (Konektivitas, Internet, Listrik)	Indeks Infrastruktur	Tidak ada pada PK	–	–	–	n/a	n/a	Tidak teridentifikasi	Pengaruh terbesar kenaikan rencana (±43%)	Tetapkan pemilik data

Sumber: Cetakan Evaluasi RENJA SKPD; PK 2026; SK Metodologi; Laporan Monev (notulensi 4 Agustus 2026).

1. Program/kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja. Layanan KKPR (224 layanan, 74,7% target), PBG/SLF (123 dokumen, 102,5%), sedot lumpur tinja (368 RT, 36,8%), serta paket terstandar yang selesai menurut Monev (Pokir Bina Marga, irigasi, air limbah). Kontribusi pada Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan kepatuhan PBG/SLF langsung menurut definisi indikator, tetapi belum dibuktikan kuantitatif.
2. Program/kegiatan yang belum memberikan kontribusi optimal. SPAM (0 SR), SPALD (0 m^3/hari menurut Renja), pemeliharaan gedung strategis (belanja Rp3,84 miliar tanpa keluaran), dan pelatihan konstruksi (0 orang). Pada Jalan, kesenjangan terbesar justru terletak pada ketidaksejalanan data antara Renja dan Monev.
3. Program/kegiatan yang berisiko menghambat target akhir Renstra. Paket jembatan (Aik Bual, Pokir), jalan Kidang–Semoyan, RISPAM dan DAK SPAM, EFAKSI dan OP irigasi, serta L2T2. Diperlukan uji tanah sebelum DED, penyelesaian dokumen RISPAM, dan koordinasi lintas sektor untuk RTRW. Komponen Konektivitas pada Indeks Infrastruktur tidak memiliki program pada PK.
4. Keterkaitan dengan strategi korektif. Rekomendasi sejalan dengan Tabel 3.7 dan 3.8: Indeks Infrastruktur, SAKIP, dan sanitasi aman (risiko Tinggi) serta Drainase dan Permukiman (Kritis) menjadi prioritas, sedangkan IKLI memerlukan validasi basis hitung.

ANALISIS KETERPADUAN KINERJA DAN ANGGARAN

Kinerja. Empat IKU tidak berubah dari Triwulan I. IKLI dan Kesesuaian berada di atas atau pada target 2030, sedangkan Indeks Infrastruktur (83,32% target 2030) dan SAKIP (89,87%) tertinggal. Sanitasi aman naik menjadi 3,33% tetapi masih di bawah target 2026.

Pelaksanaan. Keluaran fisik mulai terlihat pada Triwulan II: 72 paket Pokir Bina Marga, 15 paket irigasi, dan 20 paket air limbah menurut Monev, serta 23,8 km irigasi menurut Renja. Namun keluaran Renja untuk Jalan dan SPALD masih nol,

sedangkan SPAM belum menghasilkan sambungan rumah. Paket jembatan dan Kidang–Semoyan tertinggal dari rencana.

Anggaran dan sumber daya. Serapan Semester I 39,22% dari pagu PK dan 19,98% dari pagu Renja. Belanja Penunjang telah 73,26% dari pagu PK, sedangkan Jalan baru 11,42% dan SPAM 3,11%. Gedung terserap 83,39% PK tanpa keluaran pemeliharaan. Efisiensi SDM, TI, dan inovasi belum dapat dinilai secara kuantitatif.

Keberlanjutan. Indikator baik yang perlu penguatan: IKLI (validitas data) dan Kesesuaian (RTRW). Indikator yang tertinggal meski anggaran terserap: Indeks Infrastruktur (tidak merespons paket selesai) dan sanitasi aman (SPALD terserap Rp504 juta tanpa keluaran pada Renja). Anggaran belum terserap yang berpotensi menghambat: SPAM Perluasan, OP irigasi, dan Jalan. Kegiatan yang berpeluang meningkatkan keluaran tanpa tambahan sumber daya: KKPR, PBG/SLF, dan L2T2 (pemanfaatan baru 3 dari 25 m^3/hari). Kebutuhan perbaikan: rekonsiliasi Renja–Monev, pembaruan keluaran tiap triwulan, target triwulanan, dan pemilik data komponen indeks. Efisiensi tidak disamakan dengan pengurangan belanja.

RENCANA TINDAK LANJUT TRIWULAN III DAN PERENCANAAN TAHUN BERIKUTNYA

Tabel 3.13 Matriks Rencana Tindak Lanjut

No.	Permasalahan/Temuan	Indikator atau Program Terkait	Tindakan Korektif	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab	Bukti Penyelesaian	Mekanisme Monitoring	Implikasi terhadap Renja/RKA Tahun Berikutnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Keluaran Renja tidak sejalan dengan Monev (Jalan, SPALD)	Jalan; Air Limbah	Rekonsiliasi keluaran Renja–Monev–kontrak dan perbarui Renja	Tw III 2026 (selesai pada Tw III)	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Zulkarnain Hakim, S.E., M.Ak.; Bidang terkait	Berita acara rekonsiliasi	Verifikasi bulanan	Pembaruan keluaran tiap triwulan
2	Paket jembatan dan Kidang–Semoyan tertinggal; sondir awal tidak sesuai	Penggantian Jembatan; Rekonstruksi Jalan	Monitoring fisik mingguan; uji tanah ulang; konfirmasi batas kontrak	Dipantau sampai akhir 2026	Sekretaris Dinas (selaku PJ Bina Marga), Muhamad Sarjan, S.T., M.T.	Laporan progres mingguan	Rapat mingguan; peringatan dini	Survei dan uji tanah sebelum DED
3	RISPAM belum selesai; RC DAK belum terpenuhi; pelaporan DAK 27%	SPAM; DAK Cerorong Danau Biru	Target penyelesaian RISPAM; PIC dan checklist DAK	Tw III 2026 (selesai pada Tw III)	Kepala Bidang Cipta Karya, Iqbal Prayadi Saputra, S.T., M.T.	Dokumen RISPAM; checklist	Rapat khusus RISPAM–RC	RISPAM sebagai dasar usulan SPAM
4	EFAKSI 5%; OP belum dilaksanakan; serapan melampaui progres	Irigasi	Target EFAKSI; jadwal OP; rekonsiliasi paket	Dipantau sampai akhir 2026	Kepala Bidang SDA, Munawardi, S.T., M.T.	Jadwal dan laporan progres	Laporan bulanan	Prioritas OP pada Renja 2027
5	Pemanfaatan L2T2 3 dari 25 m³/hari	Air Limbah; Sanitasi aman	Target penambahan pelanggan dan volume L2T2	Dipantau sampai akhir 2026	Kepala Bidang Cipta Karya, Iqbal Prayadi Saputra, S.T., M.T.; UPT Air Limbah	Laporan volume bulanan	Laporan UPT	Target volume L2T2 pada Renja 2027
6	Belanja gedung tanpa keluaran; gaji ASN 75,53% pada Semester I	Gedung; Penunjang	Rinci komponen belanja; verifikasi dasar pembayaran	Tw III 2026 (selesai pada Tw III)	Sekretaris Dinas; Kepala Bidang Cipta Karya, Iqbal Prayadi Saputra, S.T., M.T.	Rincian belanja	Verifikasi keuangan	Reviu pagu dan target keluaran
7	RTRW/RDTR menunggu lintas sektor; honorarium FPR belum tuntas	Penataan Ruang	Dokumen pendukung pembahasan; anggaran FPR	Perlu koordinasi/keputusan pihak di luar DPUPR	Kepala Bidang Penataan Ruang, Lalu Rudy Hermawan, S.T., M.P.W.K.	Risalah pembahasan	Pemantauan bulanan	Urutan RTRW–RDTR pada jadwal perencanaan

No.	Permasalahan/Temuan	Indikator atau Program Terkait	Tindakan Korektif	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab	Bukti Penyelesaian	Mekanisme Monitoring	Implikasi terhadap Renja/RKA Tahun Berikutnya
8	Operator lalai mengisi laporan; belum ada PIC dan checklist	Pelaporan kinerja; SAKIP	Menetapkan PIC dan checklist pelaporan	Tw III 2026 (selesai pada Tw III)	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Zulkarnain Hakim, S.E., M.Ak.	SK PIC; checklist	Rapat monev	Anggaran administrasi pelaporan
9	Indeks Infrastruktur tidak berubah; Konektivitas tanpa pemilik data	Indeks Infrastruktur	Menetapkan pemilik data komponen; konfirmasi seri target SK	Tw III 2026; koordinasi di luar DPUPR	Sekretaris Dinas; Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Zulkarnain Hakim, S.E., M.Ak.	BA koordinasi; SK	Koordinasi triwulanan	Indikator/kegiatan komponen pada Renja 2027
10	Pagu Renja melampaui PK/DPA; target tahun 2026 yang perlu direviu	Seluruh program	Rekonsiliasi pagu; reviu target	Renja 2027 (perencanaan tahun berikutnya)	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Zulkarnain Hakim, S.E., M.Ak.; Bappeda	Berita acara	Reviu Renja	Renja disusun dari plafon riil

Penanggung jawab mengikuti PK 2026; tenggat resmi ditetapkan pimpinan.

PENUTUP DAN DATA YANG BELUM TERSEDIA

Pada Triwulan II, empat IKU bertahan pada nilai Triwulan I dan tetap berada pada kategori Sangat Tinggi terhadap target tahunan, tetapi dua di antaranya (Indeks Infrastruktur dan SAKIP) masih tertinggal dari target 2030. Keluaran fisik mulai terlihat menurut Monev, sementara Renja belum mencerminkannya, dan serapan Semester I baru 39,22% dari pagu PK. Persoalan utama pada periode ini adalah keterkaitan keluaran dengan nilai indeks serta konsistensi data, di samping kesiapan teknis paket jembatan, RISPAM, dan koordinasi lintas sektor tata ruang.

Data yang belum tersedia dan karenanya tidak dianalisis: nilai komponen IKLI dan Indeks Infrastruktur, target triwulanan fisik dan keuangan per paket, dokumen kontrak, DPA lengkap, matriks RTL Triwulan II yang asli, data 2021–2023, serta data SDM, TI, dan inovasi layanan 2026.

BAB IV
PENUTUP

IV.1 SIMPULAN UMUM

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah pada Triwulan II (April–Juni) Tahun 2026 dan capaian kumulatif Semester I, dapat disimpulkan bahwa keempat Indikator Kinerja Utama (IKU) berada pada kategori Sangat Tinggi terhadap target tahunan 2026 menurut skala Perbup 84/2024. Namun, nilai seluruh IKU tidak berubah dari Triwulan I, dan dua IKU masih tertinggal dari target akhir Renstra Tahun 2030. Rincian simpulan adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) mencapai 65,70 dari target 2026 sebesar 53,91 (121,87%). Nilai ini sudah melampaui target akhir Renstra Tahun 2030 (64,76), serta melampaui target PK 2026 (52,68; capaian 124,72%) dan target RPJMD 2026 (58,98; capaian 111,39%), tetapi tidak berubah sejak Triwulan I dan basis hitungnya perlu dipastikan.
2. Indeks Infrastruktur mencapai 61,89 dari target 2026 sebesar 63,33 menurut SK Metodologi (97,73%), atau kurang 1,44 poin. Terhadap target PK 2026 (60,89) capaian sudah 101,64% dan terhadap target RPJMD 2026 (58,55) sebesar 105,70%. Terhadap target akhir Renstra Tahun 2030 (74,28), capaian baru 83,32% dengan selisih 12,39 poin, sehingga risikonya dikategorikan Tinggi.
3. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang mencapai 100% dan stabil pada target. Layanan KKPR pada Triwulan II mencapai 224 dari target tahunan 300 (74,67%).
4. Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah sebesar 72 dari target 2026 sebesar 73,04 (98,58%), atau kurang 1,04 poin. Terhadap target 2030 (80,12), capaian baru 89,87% sehingga risikonya dikategorikan Tinggi. Nilai ini merupakan hasil evaluasi resmi tahunan dan tidak berubah antartriwulan.
5. Indikator outcome program pada Triwulan II tidak mengalami perubahan, kecuali RT akses sanitasi aman yang naik dari 3,19%

menjadi 3,33% (74,50% dari target 2026, kategori Sedang). Indikator Drainase dan Permukiman belum memiliki data karena programnya tidak beranggaran pada PK 2026, sedangkan indikator Tenaga Kerja Konstruksi Ahli belum dapat dihitung (bernilai 0 pada Triwulan I dan II).

6. Keuangan: serapan Semester I mencapai Rp25,70 miliar atau 39,22% dari pagu PK Rp65,53 miliar (19,98% dari pagu Renja Rp128,64 miliar). Pagu PK tersebut hanya 43,81% dari pagu indikatif RPJMD 2026 untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (Rp149,60 miliar), dan program Drainase, Permukiman, serta Penataan Bangunan dan Lingkungannya tidak dianggarkan pada PK. Serapan Triwulan II sebesar Rp19,10 miliar, hampir tiga kali Triwulan I sebesar Rp6,60 miliar, namun deviasi fisik–keuangan masih negatif pada sejumlah program, misalnya Jasa Konstruksi (−13,87 poin).

Secara keseluruhan, kinerja Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan kinerja yang baik terhadap target tahunan, tetapi persoalan utama terletak pada keterkaitan antara keluaran fisik dan nilai indeks, konsistensi data antara Renja, Monev, dan dokumen kontrak, serta kesiapan teknis paket pekerjaan. Dengan penguatan sistem pengukuran dan pemantauan kinerja, DPUPR diharapkan mampu mempertahankan tren peningkatan kinerja dan memperkuat tata kelola yang akuntabel, terukur, dan berkelanjutan pada Triwulan III dan IV Tahun 2026.

IV.2 SARAN/REKOMENDASI

1. Rekonsiliasi Data dan Pembaruan Keluaran Renja–Monev–Kontrak

   Rekonsiliasi dilakukan agar angka keluaran, pagu, dan realisasi konsisten antar dokumen.

   - Triwulan III 2026 dilakukan rekonsiliasi keluaran Renja dengan Monev dan dokumen kontrak, termasuk pembaruan keluaran fisik setiap triwulan.
   - Selisih pagu Renja (Rp128,64 miliar) terhadap pagu PK (Rp65,53 miliar) dijelaskan dan dirujuk secara konsisten pada setiap laporan, termasuk perbedaan jumlah penerima

gaji dan tunjangan ASN (PK 117 orang/bulan, Renja 500 orang/bulan, dan data kepegawaian Bab I 185 PNS).

2. Sinkronisasi Target RPJMD, Renstra, dan Perjanjian Kinerja
   Target IKU pada ketiga dokumen belum seragam sehingga persentase capaian berbeda menurut dokumen acuan.

   - Memverifikasi target PK 2026 untuk IKLI (52,68) dan Indeks Infrastruktur (60,89) yang sama dengan target 2025 pada Renstra, dan melakukan perubahan PK atau Renstra apabila diperlukan.
   - Menyelaraskan target IKLI dan Indeks Infrastruktur pada Renstra dengan RPJMD (58,98 dan 58,55 pada 2026), atau mendokumentasikan alasan perbedaannya, serta memvalidasi indikator PK bertanda (*) yang masih berupa usulan penyusun melalui dialog kinerja.

3. Pematangan Sistem Informasi Kinerja (SI PRAJA) dan Penguatan Pemantauan Berjenjang
   SI PRAJA diarahkan menjadi sistem utama yang menghubungkan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.

   - Tahun 2026 difokuskan pada pematangan aplikasi, integrasi indikator hingga level kegiatan dan subkegiatan, serta dashboard monitoring.
   - Penetapan PIC dan checklist pelaporan, serta indikator tata kelola data (ketepatan waktu, akurasi, konsistensi antarsumber, dan deteksi dini deviasi).

4. Penetapan Pemilik Data dan Validasi Pengukuran IKU
   Pengukuran IKU perlu didukung data yang jelas sumber dan penanggung jawabnya.

   - Menetapkan pemilik data untuk setiap komponen Indeks Infrastruktur, termasuk komponen Konektivitas, Internet, dan Listrik yang belum memiliki indikator pada PK.
   - Memvalidasi basis hitung IKLI, menetapkan seri target Indeks Infrastruktur yang dipakai (SK Metodologi, RPJMD, atau PK), serta menyusun target triwulanan.

5. Penguatan Kesiapan Teknis serta Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur

   Kesiapan teknis dan pemeliharaan rutin menentukan kemantapan layanan dan keberlanjutan aset.

   - Survei dan uji tanah dilakukan sebelum penyusunan DED paket jembatan dan jalan, disertai pemantauan berkala.
   - Mempercepat penyelesaian RISPAM agar Readiness Criteria DAK SPAM terpenuhi, serta memperkuat operasi dan pemeliharaan irigasi dan air limbah.

6. Percepatan Dokumen Tata Ruang dan Dukungan Lintas Sektor

   Penyelesaian dokumen tata ruang memerlukan koordinasi yang berkesinambungan.

   - Memperkuat koordinasi lintas sektor di tingkat kementerian untuk penetapan RTRW dan RDTR.
   - Mengalokasikan honorarium Forum Penataan Ruang sejak awal tahun anggaran.

7. Perencanaan Tahun Berikutnya (Renja 2027)

   Renja 2027 perlu memperbaiki penyusunan target dan indikator.

   - Mereviu target indikator yang lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya, seperti Irigasi dan Kemantapan Jalan, serta menyusun indikator untuk program Drainase dan Permukiman.
   - Mengkalibrasi target sanitasi aman, dan mempertimbangkan target IKU yang telah melampaui target akhir Renstra.

Dengan tindak lanjut tersebut, penyusunan laporan kinerja pada periode berikutnya diharapkan semakin akurat, konsisten, dan akuntabel, sekaligus mendorong pencapaian target kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah sampai akhir periode Renstra Tahun 2025–2029.